

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PROSES PENYELENGGARAAN KLHS

4.1 HASIL DAN PEMBAHASAN TAHAP PERSIAPAN

4.1.1 Hasil dan Pembahasan Tahap Identifikasi Para Pemangku Kepentingan

Pokja Kajian Lingkungan Hidup Strategis RZWP-3-K Provinsi Lampung Tahun 2017-2037 mengidentifikasi pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam proses KLHS. Tujuan identifikasi dan pelibatan pemangku kepentingan adalah:

- 1) Menentukan secara tepat pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
- 2) Menjamin diterapkannya azas partisipasi yang diamanatkan UU PPLH;
- 3) Menjamin bahwa hasil perencanaan dan evaluasi kebijakan,rencana dan/atau program memperoleh legitimasi atau penerimaan oleh publik;
- 4) Memberdayakan pemangku untuk menyampaikan informasi, saran, pendapat, dan pertimbangan tentang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan melalui proses penyelenggaraan KLHS.

Identifikasi pemangkurepresentatif dapat diawali dengan pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping analysis*). Pemetaan ini untuk membantu melihat pengaruh pemangku kepentingan tetapi juga mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program yang akan dirumuskan serta peduli terhadap lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.



Tabel 4.1 Pemetaan Pemangku Kepentingan

Posisi dan Peran	Masyarakat/Lembaga/Instansi/ Pemangku Kepentingan
Pembuat keputusan dan/atau penyusun	Dinas Kelautan dan Perikanan
kebijakan, rencana dan/atau program	Provinsi Lampung
Lembaga/instansi terkait	Dinas Lingkungan Hidup Lampung
	Dinas ESDM Lampung
	Dinas Pariwisata Lampung
	Dinas Perhubungan Lampung
	Dinas PUPR
	Bappeda Lampung
	BKSDA Lampung
	Satker Lampung, BPSPL Serang
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisr Barat
	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
Masyarakat yang memiliki informasi	Universitas Lampung (UNILA)
dan/atau keahlian (perorangan/tokoh/	Yayasan Cikal
kelompok)	Yayasan Mitra Bentala
	Walhi
	HNSI Lampung
Masyarakat yang Terkena	Kelompok Nelayan
Dampak	Kelompok Budi Daya perikanan
	Pengusaha Pariwisata

4.1.2 Hasil dan Pembahasan Tahap Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun telah memenuhi persyaratan untuk Penyusunan KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung. Penyajian Kerangka Acuan meliputi: Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran, Lingkup Kegiatan, Hasil yang Diharapkan, Cara Pembuatan dan Pelaksanaan, Rencana Kerja yang Mencakup Jadwal Kerja, Kebutuhan Tenaga Ahli yang Diperlukan dan Pembiayaan.



4.2 HASIL DAN PEMBAHASAN TAHAP PENGKAJIAN

4.2.1 Hasil dan Pembahasan Tahap Identifikasi dan Perumusam Isu Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi dan perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan sesuai amanat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dalam Pasal 8. Proses pelaksanaan identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui Focus Group Discusion (FGD). FGD dilakukan dengan Pokja dan pihak-pihak terkait baik dari satker pemerintah, perguruan tinggi (Universitas Lampung), Lembaga Swadaya Masyarakat, Walhi, HNSI Lampung, swasta dan masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang terkait secara langsung. Hasil isu-isu pembangunan berkelanjutan dari FGD dilakukan integrasi dengan isu-isu yang terdapat dalam Renstra Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K) Provinsi Lampung. Dalam rangka memastikan bahwa isu-isu pembangunan yang dikemukakan dalam FGD sesuai dengan konteks Provinsi Lampung dilakukan wawancara untuk memperoleh pandangan para pihak yang tidak terfasilitasi melalui FGD karena alasan lokasi yang jauh dan pengaturan waktu untuk berkumpul. Wawancara melibatkan pemerintah para pengambil keputusan, tokoh masyarakat, para nelayan kecil yang merasakan dampak dari kebijakan pembangunan daerah. Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan menghasilkan 15 (lima belas) isu pokok (Tabel 4.2) yang selanjutnya ditetapkan sebagai isu pokok pembangunan berkelanjutan.

Tabel 4.2 Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Hasil FGD

No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Hasil Penjaringan Isu (isu panjang)								
A	Isu Lingkungan									
1	Pencemaran dan degradasi habitat	 ✓ Antisipasi dalam pemanfaatan kegiatan pertambangan ✓ Terjadinya pencemaran di sepanjang wilayah pantai baik akibat dari limbah domestik maupun industri di sepanjang pantai ✓ Tercemarnya air laut diakibatkan banyaknya industri-industri di sepanjang pesisir 								



No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Hasil Penjaringan Isu (isu panjang)
		✓ Dugaan pencemaran akibat kegiatan tambak udang di pesisir pantai Kelumbayan dan patai Cukuh Balak, Kota Agung
		✓ Dampak rencana kegiatan pembangunan kawasan industri maritim (KIM) di wilayah pantai /pesisir Cukuh Balak, Limau, Kota Agung Timur
		✓ Antisipasi limbah B3 yang dibuang di laut
		✓ Banyaknya sampah di wilayah pesisir
		 Dampak lain sampah atau limbah dari industri pariwisata di obyek pariwisata
		 Sampah yang terakumulasi di teluk lampung, sehingga teluk lampung menjadi daerah yang dipenuhi sampah
		✓ Terkait sampah harus ada regulasi /peraturan yang jelas
		✓ Adanya pembangunan dermaga khusus dan penambangan pasir laut yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem (adanya kemungkinan kerusakan)
		✓ Pertambangan pasir tidak mengindahkan konsep "Good Mining" sehingga merusak lingkungan
		✓ Kerusakan pesisir pantai akibat penambangan pasir sungai di muara Way Semaka
		✓ Mencabut alokasi ruang pertambangan di Kecamatan Rajabas, Lampung Selatan karena mengancam keberadaan kawasan konservasi CA dan CAL Krakatau
		✓ Penambangan pasir di Lampung Timur =
		penutupan yang berdasar hukum yang kuat ✓ Mencabut alokasi ruang pertambangan di pulau sekopong karena mengancam keberadaan pulau sekopong dan wilayah tangkap nelayan
		✓ Eksploitasi pasir laut di sekitar perairan Provinsi Lampung (terutama di Pantai Timur) semakin menghawatirkan. Beberapa pulau semakin berkurang luas daratannya
		✓ Adanya keresahan sosial masyarakat khususnya di Labuhan Maringgai terkait adanya kegiatan penambangan pasir laut di wilayah Sekopong, kuatir akan menurunkan produksi tangkap ikan
		✓ Kerusakan hutan mangrove cukup banyak
		✓ Kerusakan mangrove, padang lamun, terumbu karang, pencemaran limbah industri dan limbah domestik



	Isu Pembangunan	
No.	Berkelanjutan	Hasil Penjaringan Isu (isu panjang)
		 ✓ Reklamasi berdampak pada lingkungan ✓ Penambahan darat untuk pemukiman yang tidak sesuai lingkungan ✓ Tidak boleh ada reklamasi yang mengganggu dan/atau merusak lingkungan hidup
2	Alih Fungsi Lahan Mangrove	 ✓ Adanya alih fungsi lahan dan meningkatnya pembangunan di kawasan pantai dan pulaupulau kecil oleh investor yang digunakan untuk penginapan /hotel, pertokoan, rumah makan ✓ Kawasan <i>greenbelt</i> pesisir dalam hal ini hutan mangrove tidak boleh di alih fungsikan ✓ Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lain (perkebunan, tambang, pertanian, pemukiman) ✓ Alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak
3	Potensi rawan bencana	✓ Beberapa daerah sering terjadi banjir✓ Sering longsor di pesisir barat
4	Penggunaan alat tangkap ikan yang merusak/ilegal fishing	 ✓ Keberadaan populasi lumba-lumba disekitar pertanian teluk kiluan menjauh bila ada kegiatan tangkap disekitar perairan Teluk Kiluan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan dari luar Kiluan yang melakukan kegiatan tangkap dengan menggunakan kapal bagan badak, pursein, bagan tongkol ✓ Nelayan mengunakan bom ikan ✓ Adanya masyarakat yang masih melakukan kegiatan pengeboman ikan di perairan sekitar CAL Kepulauan Krakatau alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan
5	Padat tangkap di perairan pantai	 ✓ Terlalu banyak nelayan yang beroperasi di Pesisir Timur Lampung ✓ Banyak nelayan luar Lampung yang menangkap di perairan Lampung
В	Isu Ekonomi	
1	Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang belum optimal	 ✓ Kurang kreatif dalam pengelolaan hasil tangkap dan budi daya perikanan ✓ Masih kurang eksploitasinya wisata alam pesisir ✓ Belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil ✓ Pemanfaatan wisata bahasi belum optimal ✓ Pemanfaatan perikanan tangkap belum optimal
2	Kualitas SDM pesisir dan pulau-pulau kecil rendah	 ✓ Tingkat pendidikan, tabiat/kebiasaan masyaralat lokal sekitar kawasan hutan konservasi masih rendah, hal ini terutama



	In Dank	
No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Hasil Penjaringan Isu (isu panjang)
		terkait dengan pemerintah di kawasan tersebut, tanggapan masyarakat masih orientid ✓ Banyak penduduk pesisir yang tingkat pendidikannya rendah ✓ Kurangnya keterampilan penduduk pesisir
3	Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	 ✓ Tingkat perekonomian penduduk wilayah pesisir yang rendah, terutama yang bekerja sebagai nelayan ✓ Tingginya angka pengangguran ✓ Daerah kumuh di pesisir ✓ Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir ✓ Perekonomian masyarakat rendah
4	Daya saing produk perikanan rendah	✓ Kualitas produk perikanan masih rendah✓ Pengolahan belum berjalan baik
5	Akses permodalan nelayan dan pembina terbatas	✓ Nelayan kekurangan modal✓ Nelayan masih sulit pinjam di bank
С	Isu Sosial dan Kelembagaan	
1	Potensi konflik sosial yang tinggi	 ✓ Konflik sosial akibat rencana pembangunan KIM masalah pembebasan lahan dan ketenagakerjaan, serta lunturnya budaya lokal akibat masuknya budaya luar ✓ Sering terjadi konflik antar nelayan
2	Ketaatan dan penegakan hukum masih rendah	 ✓ Maraknya perampokan dilaut ✓ Alat tangkap trawl masih beroperasi meski sudah dilarang ✓ Kapal trawl gampang bebas kalau sudah ditangkap
3	Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	 ✓ Kurangnya sarana telekomunikasi di pulaupulau kecil ✓ Kurangnya sumber energi di pulau-pulau kecil ✓ Fasilitas jalan di wilayah pesisir masih kurang baik ✓ Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
4	Potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dan tumpang tindih antar sektor dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan dan	 ✓ Potensi konflik kepentingan ✓ Tumpang tindih kewenangan antar sektor



	Isu Pembangunan	
No.	Berkelanjutan	Hasil Penjaringan Isu (isu panjang)
	pemanfaatan wilayah pesisir	
5	Proses pelibatan masyarakat sebagai subyek utama dalam pengelolaan wilayah pesisir masih belum optimal	 ✓ Kebijakan pembangunan masih top down ✓ Masyarakat kurang terlibat dalam kebijakan pembangunan ✓ Pembangunan belum sesuai kebutuhan ✓ Bantuan pemerintah sering tidak sesuai kebutuhan masyarakat

 Tabel 4.3
 Isu-Isu Pokok Pembangunan Berkelanjutan

No	Isu Lingkungan
1	Pencemaran dan degradasi habitat
2	Alih Fungsi Lahan Mangrove
3	Potensi rawan bencana
4	Penggunaan alat tangkap ikan yang merusak/ilegal fishing
5	Padat tangkap di perairan pantai
	Isu Ekonomi
6	Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang belum optimal
7	Kualitas SDM pesisir dan pulau-pulau kecil rendah
8	Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
9	Daya saing produk perikanan rendah
10	Akses permodalan nelayan dan pembina terbatas
	Isu Sosial dan Kelembagaan
11	Potensi konflik sosial yang tinggi
12	Ketaatan dan penegakan hukum masih rendah
13	Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
14	Potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dan tumpang tindih antar sektor dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir
15	Proses pelibatan masyarakat sebagai subyek utama dalam pengelolaan wilayah pesisir masih belum optimal



4.2.2 Hasil dan Pembahasan Tahap Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Isu Pembangunan Berkelanjutan dianalisis dengan Pasal 9 ayat 1 menjadi isu strategis dengan memperhatikan antara lain:

- 1. Karakteristik wilayah;
- 2. Tingkat pentingnya potensi dampak;
- 3. Keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan;
- 4. Kerkaitan dengan materi muatan KRP;
- 5. Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- 6. Hasil KLHS dari KRP pada hirarki diatasnya yang harus diacu.

Tabel 4.4 Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis di Wilayah Kajian RZWP3K Provinsi Lampung

Isu PB	Karakter	Pentingr	Pentingnya Dampak		KRP Terkait	RPPLH	KLHS			
ISU PD	Geomorfologi	RTR	LC	Luas	Sering	Terkait	KKP Terkait	KPPLN	Diatasnya	
Isu Lingkungan										
Pencemaran dan degradasi habitat	Perubahan geomorfologi	Pola ruang	Perubahan tutupan	Luas	Tiap tahun	2,3	Pembangunan kawasaan industri, pelabuhan, reklamasi, penambang	Belum ada rencana pengelolaanya	belum ada penanganan dari KLHS pada hirarki	
2. Alih Fungsi Lahan Mangrove	Perubahan sempadan	Pola ruang	Perubahan tutupan	Luas	Tiap tahun	1,3	Kawasan industri, pertambakan, pemukiman, dan pelabuhan	-	KLHS di atasnya	
3. Potensi rawan bencana	Geomorfologi, perubahan sempadan pantai	Pola ruang	Perubahan tutupan	Luas	Tiap tahun	1,2	Pembangunan kawasaan industri, pelabuhan, reklamasi, dan penambang	-		
4. Penggunaan alat tangkap ikan yang merusak/ilegal fishing				Luas	Tiap tahun		Pengembangan perikanan tangkap	-		
5. Padat tangkap di perairan pantai				Luas	Tiap tahun	6	Pengembangan perikanan tangkap	-		

				I			I		
Isu PB	Karakter	Pentingr	Pentingnya Dampak		KRP Terkait	RPPLH	KLHS		
isu PB	Geomorfologi	RTR	LC	Luas	Sering	Terkait	KKP Terkait	KPPLN	Diatasnya
Isu Ekonomi									
6. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang belum optimal				Luas	Tiap tahun	7,8	Pengembangan perikanan tangkap dan budi daya	-	
7. Kualitas SDM pesisir dan pulau- pulau kecil rendah				Luas	Tiap tahun	6,9	Pengembangan pengolahan perikanan, sarana dan prasarana	-	
8. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil				Luas	Tiap tahun		Sarana dan prasarana, pengembangan perikanan tangkap, budi daya dan pengolahan ikan	-	
9. Daya saing produk perikanan rendah						7	Pengembangan sarana dan prasarana, pengolahan ikan	-	
10. Akses permodalan nelayan dan pembina terbatas							Pengembangan perikanan tangkap, budi daya dan pengolahan ikan	-	
Isu Sosial dan Kelembag	gaan								
11. Potensi konflik sosial yang tinggi				Luas	Tiap tahun	6	Pembangunan kawasan industri, perikanan tangkap, pertambangan	-	



Isu PB	Karakter	Pentingn	Pentingnya Dampak		KRP Terkait	RPPLH	KLHS		
ISU F D	Geomorfologi	RTR	LC	Luas	Sering	Terkait	KKF Terkait	KFFLII	Diatasnya
12. Ketaatan dan penegakan hukum masih rendah				Luas	Tiap tahun		Pembangunan kawasan industri, perikanan tangkap, dan pertambangan	•	
13. Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil				Luas	Tiap tahun	12	Pembangunan kawasan industri, dan perikanan tangkap,	-	
14. Potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dan tumpang tindih antar sektor dan stakeholders				Luas	Tiap tahun	11	Pembangunan kawasan industri, perikanan tangkap, dan pertambangan	-	
15. Proses pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir masih belum optimal				Luas		11,6	Pembangunan kawasan industri, perikanan tangkap, dan pertambangan	-	



Berdasarkan pentingnya dampak, keterkaitan antar isu pembangunan berkelanjutan dan keterkaitannya dengan rencana program kegiatan maka ditetapkan 12 (dua belas) isu strategis yang telah disepakati bersama yaitu sebagai berikut:

- 1. Pencemaran dan degradasi habitat;
- 2. Potensi rawan bencana;
- 3. Penggunaan alat tangkap ikan yang merusak/ilegal fishing;
- 4. Padat tangkap di perairan pantai;
- 5. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang belum optimal;
- 6. Kualitas SDM pesisir dan pulau-pulau kecil rendah;
- 7. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil:
- 8. Daya saing produk perikanan rendah;
- 9. Ketaatan dan penegakan hukum masih rendah;
- 10. Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 11. Potensi konflik sosial dan kepentingan *(conflict of interest)* dan tumpang tindih antar sektor dan *stakeholders*; dan
- 12. Proses pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir masih belum optimal.

4.2.3 Hasil dan Pembahasan Tahap Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas di Wilayah Kajian RZWP3K Provinsi Lampung (Hasil Tapisan No 2 dengan Pasal 9 (2)

Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan prioritas melalui penilaian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dalam Pasal 9 ayat 2 yang harus memuat daftar yang paling sedikit berkaitan dengan antara lain:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- b. Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;



- c. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- d. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
- e. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
- f. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
- g. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- h. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
- i. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
- j. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Memilih Isu pembangunan berkelanjutan prioritas dilakukan melalui Skoring. Indikator yang digunakan untuk memilih adalah besaran nilai skoring yang disepakati oleh Pokja PL dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Provinsi Lampung dan para pemangku kepentingan terkait. Hasil identifikasi terdapat pada **Tabel 4.5.**

 Tabel 4.5
 Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas di Wilayah Kajian RZWP3K Provinsi Lampung

Isu PB Strategis	DDDT (1,2,3,4,5)	Dampak LH (1,2,3,4,5)	Jasa Ekosistem (1,2,3,4,5)	Cakupan Wil (1,2,3,4,5)	Mutu SDA (1,2,3,4,5)	Perubahan Iklim (1,2,3,4,5)	Masy miskin (1,2,3,4,5)	Kesehat Masy (1,2,3,4,5)	Kaw Adat (1,2,3,4,5)	Skor
Pencemaran dan degradasi habitat	5	5	5	5	5	5	3	5	1	41
Potensi rawan bencana	5	5	5	3	5	5	2	2		32
Penggunaan alat tangkap ikan yang merusak/ilegal fishing	2	2		4	3		4			15
Padat tangkap di perairan pantai	1	1		1	1		2			6
Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang belum optimal				3			4	1		8
Kualitas SDM pesisir dan pulau-pulau kecil rendah				1			4	2		7
Rendahnya tingkat				1			4	3		8

Isu PB Strategis	DDDT (1,2,3,4,5)	Dampak LH (1,2,3,4,5)	Jasa Ekosistem (1,2,3,4,5)	Cakupan Wil (1,2,3,4,5)	Mutu SDA (1,2,3,4,5)	Perubahan Iklim (1,2,3,4,5)	Masy miskin (1,2,3,4,5)	Kesehat Masy (1,2,3,4,5)	Kaw Adat (1,2,3,4,5)	Skor
kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil										
Daya saing produk perikanan rendah				1			1	1		3
Ketaatan dan penegakan hukum masih rendah	2	2	2	2	2				2	12
Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil				4			3	2		9
Potensi konflik sosial dan kepentingan (conflict of interest) dan tumpang tindih antar sektor dan stakeholders	2	4	2	2						10

Isu PB Strategis	DDDT (1,2,3,4,5)	Dampak LH (1,2,3,4,5)	Jasa Ekosistem (1,2,3,4,5)	Cakupan Wil (1,2,3,4,5)	Mutu SDA (1,2,3,4,5)	Perubahan Iklim (1,2,3,4,5)	Masy miskin (1,2,3,4,5)	Kesehat Masy (1,2,3,4,5)	Kaw Adat (1,2,3,4,5)	Skor
Proses pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir masih belum optimal	1	1	1	2	1					6



Berdasarkan hasil penilaian dan kesepakatan bersama telah ditentukan isu pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan prioritas di Provinsi Lampung, yaitu :

	Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas
1.	Pencemaran dan degradasi habitat
2.	Potensi rawan bencana
3.	Penggunaan alat tangkap ikan yang merusak/ilegal fishing
4.	Ketaatan dan penegakan hukum masih rendah
5.	Potensi konflik sosial dan kepentingan (conflict of interest) dan tumpang tindih antar sektor dan stakeholders
6.	Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil
7.	Kualitas SDM pesisir dan pulau-pulau kecil rendah
8.	Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil
9.	Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang belum optimal

❖ Pencemaran dan Degradasi Habitat

Isu akan kesadaran dan kepedulian yang masih rendah terhadap lingkungan di WP-3-K Lampung muncul disebabkan oleh tingginya pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan pesisir tanpa mengukur daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan pesisir yang bisa digunakan dan tanpa diikuti oleh aksi konservasi, sehingga pemanfaatan yang terjadi tidak dapat berlanjut secara berkesinambungan. Kondisi pemanfaatan yang terjadi saat ini berakibat terhadap rusaknya ekosistem pantai (terumbu karang, padang lamun dan mangrove), taman nasional dan cagar alam laut, pencemaran dan intrusi air laut. Tingkat kerusakan biofisik lingkungan wilayah pesisir sangat mengkhawatirkan. Adapun faktor-faktor yang turut mempengaruhi kerusakan biofisik wilayah pesisir adalah:



- 1) Overeksploitasi sumberdaya hayati laut akibat penangkapan ikan yang melampaui potensi *(overfishing)*, pencemaran dan degradasi fisik hutan mangrove dan terumbu karang sebagai sumber makanan biota laut tropis
- 2) Pencemaran akibat kegiatan industri, rumah tangga dan pertanian di darat (*land-based pollution sources*) maupun akibat kegiatan dilaut (*marinebased pollution sources*) termasuk perhubungan laut dan kapal tanker dan kegiatan pertambangan dan energi lepas pantai.
- 3) Bencana alam seperti tsunami, banjir, erosi, dan badai
- 4) Konflik pemanfaatan ruang seperti antara pertanian dan kegiatan di daerah hulu lainnya, aquakultur, perikanan laut, permukiman. Konflik pemanfaatan ruang disebabkan terutama karena tidak adanya aturan yang jelas tentang penataan ruang dan alokasi sumberdaya yang terdapat di kawasan pesisir dan lautan.
- 5) Kemiskinan masyarakat pesisir yang turut memperberat tekanan terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir yang tidak terkendali. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum adanya konsep pembangunan masyarakat pesisir sebagai subyek dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Potensi Rawan Bencana

Isu rawan bencana di WP-3-K Provinsi Lampung terkait dengan tingginya intensitas gempa bawah laut pada patahan lempeng Sumatera khususnya di perairan Selat Sunda dengan meningkatnya aktivitas Gunung Krakatau. Isu ini harus segera mendapat perhatian dan ditindaklanjuti guna menghindari kerugian jiwa dan materi yang sangat besar seperti yang telah terjadi pada kejadian tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pulau Mentawai. Beberapa tahun terakhir juga terjadi kejadian banjir pada daerah pesisir yaitu di Kabupaten Lampung Timur, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Tanggamus.



❖ Penggunaan Alat Tangkap Ikan Yang Merusak/Ilegal Fishing

Secara umum petugas pengawas sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP) belum berfungsi secara optimal. Selain itu di banyak daerah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) belum berfungsi dan belum berkoordinasi dengan PSDKP dengan baik. POKMASWAS sendiri seharusnya dapat menjadi informasi awal yang baik bagi kegiatan illegal yang dilakukan di laut, baik destructive fishing maupun pelanggaran oleh negara lain. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk penegakan hukum di laut sangat kurang. Para pengawas belum dilengkapi dengan transportasi dan peralatan yang memadai. Sehingga cenderung tidak dapat berbuat banyak walaupun melihat adanya pelanggaran di laut terutama yang dilakukan oleh asing. Manipulasi ukuran tonage (GT) dan perijinan (SIPI dan SIKPI) kapal ikan adalah hal yang sangat terkait dengan tidak terlaporkannya kondisi armada penangkapan yang ril atau sesungguhnya di Indonesia. Hal ini menyebabkan sulitnya untuk membuat kebijakan berkenaan dengan jumlah armada yang boleh beroperasi sebagai input control dalam pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan. Manipulasi ini banyak dilakukan pemilik kapal dengan alasan sulitnya mengurus birokrasi perijinan ke tingkat lebih tinggi jika melaporkan ukuran kapal yang sebenarnya, selain itu, hal tersebut juga dilakukan oleh pemilik kapal untuk menghindari pajak dan sebagainya. Kegiatan IUU fishing yang terjadi di perairan Indonesia memberikan dampak negatif terhadap dua sektor penting yaitu lingkungan dan pendapatan negara. Dengan adanya kegiatan IUU fishing sumberdaya ikan terkuras tanpa dimanfaatkan dengan baik sehingga akan mengalami degradasi dan overfishing. Sedangkan dari sektor pendapatan negara terjadi kehilangan nilai devisa dari sub sektor perikanan tangkap yang cukup besar dan berkurangnya nilai PNBP perikanan tangkap.

❖ Ketaatan dan Penegakan Hukum Masih Rendah

Permasalahan ini disebabkan antara lain karena kemampuan kapasitas kelembagaan pengawas perikanan masih terbatas, belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan



sumberdaya perikanan dan kapasitas kelembagaan penegakan hukum belum kuat, tegas, dan independent. Hal ini menyebabkan maraknya aksi IUU fishing, baik oleh kapal ikan asing maupun kapal ikan Indonesia, biaya operasi pengawasan yang mahal dan dengan hasil yang kurang efektifdantidak terlindunginya usaha investasi usaha yang legal dibidang perikanan tangkap. Sementara dibidang perikanan budidaya adalah masalah peraturan tata ruang yang sering kali dilanggar atau tidak dipatuhi tanpa ada tindakan yang tegas dari pemerintah atau aparat penegak hukum. Bahkan tidak sedikit aturan tata ruang diganti atau disesuaikan dengan kepentingan pribadi atau kelompok penguasa.

Terbatasnya Sarana dan Prasarana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sangat disadari bahwa laju pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Lampung terkait erat dengan adanya keberadaan sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan sektor usaha masyarakat pesisir yang kesulitan dari sisi aksesibilitas sarana perhubungan, prasarana umum lainnya, maupun perumahan. Dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan geliat pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat di WP-3-K Provinsi Lampung dapat dicapai.

Fasilitas sarana prasarana dasar sangat dibutuhkan oleh masyarakat pesisir untuk menopang kelancaran produksi dan distribusi barang dan jasa dari dan ke wilayah pesisir. Hal ini sangat penting karena berkaitan erat dengan pergerakan roda ekonomi di wilayah pesisir. Pembangunan sarana dan prasarana di WP-3-K Provinsi Lampung yang telah dicanangkan secara nasional adalah rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) dan yang dicanangkan oleh masing-masing kabupaten/kota adalah; rencana pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung, serta rencana pembangunan pelabuhan dan bandara udara di Kabupaten Pesisir Barat.



Potensi Konflik Sosial dan Kepentingan (Conflict Of Interest) dan Tumpang Tindih Antar Sektor dan Stakeholders

Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi beragamnya sumberdaya pesisir yang ada serta karakteristik wilayah pesisir yang "open acces" sehingga mendorong wilayah pesisir telah menjadi salah satu lokasi utama bagi kegiatan-kegiatan beberapa sektor pembangunan (multi-use). Dalam hal ini, konflik kepentingan tidak hanya terjadi antar "users", yakni sektoral dalam pemerintahan dan juga masyarakat setempat dan pihak swasta, namun juga antar penggunaan antara lain (i) perikanan budi daya maupun tangkapan (ii) pariwisata bahari dan pantai (iii) industri maritime seperti perkapalan (iv), pertambangan, seperti minyak, gas, dan galian lainnya; (v) perhubungan laut dan alur pelayaran dan yang paling utama adalah (vi) kegiatan konservasi laut dan pesisir seperti hutan bakau (mangrove), terumbu karang dan biota laut lainnya.

Kualitas SDM Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rendah

Rendahnya kualitas SDM yang bermukim di wilayah pesisir erat kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikan, baik formal maupun non-formal. Tingkat pendidikan seseorang sangat erat kaitannya dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dapat dipergunakannya sebagai modal untuk bekerja atau berusaha dalam mencapai kehidupan yang layak. Seseorang yang tidak memiliki pendidikan, pengetahuan, atau keterampilan yang memadai akan berpeluang besar menjadi pengangguran. Apabila hal ini terjadi pada sebagian besar warga pesisir, maka akan menimbulkan masalah sosial yang lebih parah.

Selanjutnya rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga berpengaruh terhadap rendahnya derajat kesehatan. Hal ini karena tingkat pendidikan secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pengetahun masyarakat akan penerapan pola hidup sehat. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat pesisir juga sangat erat kaitannya dengan kekumuhan wilayah pesisir dan kemiskinan masyarakatnya



Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pekerjaan nelayan di Indonesia merupakan pekerjaan informal. Hal ini menyebabkan sebagian besar nelayan Indonesia berkualitas relatif rendah, karena menjadi nelayan tidak dibutuhkan persyaratan atau ketrampilan tertentu. Sehingga kemampuan mereka dalam hal pengetahuan dan ketrampilan dalam menangkap ikan, manajemen usaha, penanganan kualitas ikan hingga pemasarannya, masih sangat terbatas. Selain itu, sistem upah untuk nelayan buruh masih bersifat harian dengan cara bagi hasil. Hal ini memberikan tingkat ketidakpastian yang tinggi terhadap kehidupan para nelayan terutama di musim paceklik. Sementara, untuk para nelayan skala kecil yang beroperasi secara mandiri, mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menentukan harga ikan hasil tangkapannya. Hal tersebut karena mereka umumnya bekerja secara sendiri-sendiri dan tidak bekerja dalam satu serikat usaha bersama. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut menyebabkan terjadinya kesulitan untuk mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggungjawab terkait dengan kurangnya kualitas nelayan, sehingga terjadi banyak kesulitan untuk melakukan alih pemahaman maupun alih teknologi. Kemudian dari sisi sosialekonomi, tingkat kesejahteraan nelayan buruh dan skala kecil di Indonesia juga akan sulit untuk ditingkatkan karena mereka mempunyai kemampuan yang terbatas dalam manajemen usaha, sehingga di saat musim panen akan menghamburkan pendapatannya dan di musim paceklik mencari pinjaman untukmenutupi kekurangan pendapatannya.

Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Laut Yang Belum Optimal

Masih lemahnya sistem pengelolaan perikanan merupakan isu strategis dan permasalahan umum yang pokok dalam mewujudkan sektor perikanan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini telah iindikasikan dengan tidak meratanya tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Indonesia. Sebagai contoh untuk perikanan tangkap, banyak perairan laut di kawasan pesisir timur dan Teluk Lampung sudah menunjukkan gejala padat tangkap (*overfishing*).



Sementara, di perairanlaut kawasan barat Lampung, tingkat pemanfaatan sumberdaya ikannya belum optimal atau masih *underfishing*. Akibatnya, pada daerah-daerah penangkapan ikan tertentu yang mengalami *over-exploitation*, nelayan-nelayannya umumnya menjadi miskin, karena sulit mendapatkan ikan hasil tangkapan. Selain itu pula, sangat rawan terjadinya konflik antar nelayan di perairan tersebut. Disisi lain, pada daerah-daerah penangkapan ikan yang tingkat pemanfaatannya belum optimal atau underfishing, sumber daya ikan yang bernilai tersebut terkesan dibuang begitu saja, bahkan di beberapa perairan, yang memanfaatkannya adalah kapal-kapal perikanan illegal dari negara lain. Untuk contoh perikanan budi daya, salah satunya adalah tingginya aktivitas budidaya di Teluk Lampung yang menyebabkan penurunan kualitas air yang cukup cepat. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap kelangsungan budidaya itu sendiri.

4.2.4 Hasil dan Pembahasan Tahap Identifikasi Materi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program di Wilayah Kajian RZWP3K

Identifikasi Materi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program di Wilayah Kajian RZWP-3-K Provinsi Lampung dianalisis berdasarkan pada Pasal 3 ayat 2 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016.

Tabel 4.6 Identifikasi KRP Yang Berdampak

No	Muston VDD	D	amp	ak d	dan /	'Resi	ko I	Н	Nilai	
No	Muatan KRP	a	b	С	d	e	f	g	Niiai	
I	Zona Pariwisata		,		,	•	-			
1	Peningkatan daya tarik dan destinasi wisata bahari	0	-	1	0	0	0	0	Tidak Signifikan	
2	Peningkatan manajemen kepariwisataan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan	
3	Pembangunan sarana keselamatan dan kesehatan wisata bahari	0	-	0	-	-	0	0	Tidak Significan	
4	Peningkatan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristik Lampung	0	-	-	0	-	0	0	Tidak Signifikan	
5	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata bahari		-	-	-	-	0	0	Siginifikan	
6	Peningkatan aksesibilitas menuju lokasi wisata	0	-	-	-	0	0	0	Tidak Signifikan	



		Ъ	amr						
No	Muatan KRP					/Resi			Nilai
_		a	b	c	d	e	f	g	
7	Peningkatan promosi pariwisata bahari	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
8	Pemberdayaan kelompok sadar wisata	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
9	Pembinaan usaha wisata bahari	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
10	Pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
II	Zona Pemukiman/ Sub Zona Pemukiman	Nela	yan						
11	Pembangunan dan pengembangan permukiman nelayan di Kota Bandar Lampung	-	-	-	-	-	0	0	Signifikan
12	Penyediaan fasilitas umum, sosial dan ekonomi yang memadai di permukiman nelayan	0	-	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
13	Peningkatan sarana dan prasarana pemukiman nelayan	0	-	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
14	Peningkatan akses di dalam permukiman dan antar permukiman	0	-	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
15	Peningkatan pengetahuan penduduk tentang permukiman nelayan yang berwawasan lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
16	Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
III	Zona Pelabuhan		•	•		•			
17	Peningkatan pelayanan kepelabuhanan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
18	Pembangunan Pelabuhan laut dan Perikanan	-	-	-	-	-	0	0	Signifikan
19	Peningkatan pembanguanan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan perikanan	-	-	-	-	-	0	0	Significan
20	Penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan pelaksanakaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
21	Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
22	Pembuatan/Pengesahan Dokumen WKOP untuk Pelabuhan Perikanan yang belum menyusunnya		0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
IV	Zona Pertambangan								
23	Pelaksanaan monitoring, controling dan pengendalian untuk pemanfaatan SDA yang berkelanjutan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan



		D	amp	ak o	dan /	'Resi	ko I	LH	B7*1 - *	
No	Muatan KRP	a	b	С	d	e	f	g	Nilai	
24	Pemantauan, pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan penambangan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan	
25	Pengembangan Eksplorasi dan Eksploitasi kawasan pertambahan yang berwawasan lingkungan	-	-	0	-	0	0	-	Signifikan	
V	Zona Perikanan Tangkap									
26	Penyusunan Masterplan perikanan tangkap Provinsi Lampung	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan	
27	Revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan	0	-	0	-	0	0	0	Tidak Signifikan	
28	Pemberian kredit alat tangkap perikanan yang terjangkau oleh nelayan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan	
29	Peningkatan pelatihan nelayan secara berkala	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan	
30	Pendaftaran, penandaan kapal dan kartu nelayan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan	
31	Penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan	
32	Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap	-	-	0	-	-	0	0	Significan	
33	Penataan alur dan proses tata niaga hasil tangkapan perikanan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan	
34	Peningkatan kualitas SDM Penyuluh Perikanan dan Pendamping Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Significan	
35	Pembinaan, monitoring dan evaluasi perijinan perikanan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan	
36	Pengembangan sistem informasi dan promosi perikanan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan	
37	Pembinaan UPI untuk kelayakan kualitas pengolahan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan	
38	Pelatihan pengolahan pasa panen yang beroirientasi global (berkualitas dan berdaya saing)	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan	
39	Peningkatan pengawasan mutu dan keragaman produk hasil perikanan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan	
40	Pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan	
41	Pembentukan dan optimalisasi peran Pokmaswas	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan	
42	Sosialisasi pelaporan hasil tangkapan sesuai standar	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Significan	



No	Muatan KRP	D	Dampak dan /Resiko LH a b c d e f g						Nilai
	A Audum Aim	a	b	С	d	е	f	g	111141
43	Sosialisasi peraturan tentang alat tangkap dan alat bantu penangkapan yang ramah lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
44	Sosialisasi Dokumen Wajib Kapal Penangkap kan : SIPI/SIKPi, Surat Laik Operasi (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Significan
45	Inventarisasi dan pemetaan alat penangkapan ikan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
46	Pembangunan jejaring kemitraan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
VI	Zona Perikanan Budi Daya/Sub Zona Bud	li Da	ya La	aut					
47	Revisi Masterplan BudidayaLaut	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
48	Penataan dan pengembangan usaha perikanan budidaya berbasis minapolitan di Kab/ Kota	0	-	0	-	0	0	0	Tidak Signifikan
49	Pengembangan budidaya laut yang berbasis masyarakat	-	-	0	-	-	0	0	Signifikan
50	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya laut	0	-	0	-	0	0	0	Tidak Signifikan
51	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang budidaya laut	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
52	Monitoring secara berkala lingkungan budi daya laut	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
53	Intensifikasi budidaya laut dan ekstensifikasi lahan budidaya laut	0	-	0	-	0	0	0	Tidak Signifikan
54	Diversifikasi budidaya laut	0	-	0	-	0	0	0	Tidak Signifikan
55	Revitalisasi pusat perbenihan ikan	0	-	0	-	0	0	0	Tidak Significan
56	Perluasan pasar budi daya laut didalam dan luar negeri	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
VII	Zona Industri/Sub Zona Industri Maritim								
57	Pengawasan dan pengendalian perkembangan fungsi peruntukan lain di dalam zona industri	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
58	Pengawasan dan pengendalian efisiensi biaya produksi, biaya pemulihan- keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
59	Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan metoda atau teknologi industri	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan



		D	amn						
No	Muatan KRP		amp b		d	Resi			Nilai
60	Pengawasan dan pengendalian terhadap	a 0	0	c	0	e 0	f 0	g 0	Tidak
	kemungkinan adanya bencana akibat keberadaan industri								Signifikan
61	Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Industri Maritim (KIM) di Tanggamus	-	-	0	-	0	-	0	Signifikan
VIII	Kawasan Konservasi								
	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-P	ulau	Keci	l (K	KP3	K)			
62	Penguatan/penetapan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
63	Penyusunan peraturan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau- pulau kecil	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
64	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengawasan sumberdaya	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
65	Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang adaptif, berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
66	Peningkatan kapasitas infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
67	Peningkatan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pelestarian sumberdaya	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
68	Pengintegrasian dan pensinergian fungsi Kawasan Konservasi pesisir dan pulau- pulau kecil dengan pembangunan di WP3K	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
69	Pemberdayaan kelompok sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
70	Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau- pulau kecil	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
71	Penataan tanda batas kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
	Kawasan Konservasi Perairan (KKP)					,			
72	Penguatan/penetapan kawasan konservasi perairan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
73	Penyusunan peraturan pengelolaan kawasan konservasi perairan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
74	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengawasan sumberdaya	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
75	Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang adaptif, berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
76	Peningkatan kapasitas infrastruktur	0	-	0	-	0	0	0	Tidak Signifikan



			a rec						
No	Muatan KRP		_		· ·	'Resi			Nilai
		a	b	C	d	е	f	g	
77	Peningkatan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pelestarian sumberdaya	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
78	Pengintegrasian dan pensinergian fungsi kawasan konservasi perairan dengan pembangunan di WP3K	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
79	Pemberdayaan kelompok sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kawasan konservasi perairan,	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
80	Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi perairan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
81	Penataan tanda batas kawasan konservasi perairan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
IX	Alur Laut	•					-	,	
	Alur Pelayaran								
82	Penetapan sistem alur pelayaran	0	-	0	-	0	0	0	Tidak Signifikan
83	Penetapan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya	0	-	0	-	0	0	0	Tidak Signifikan
84	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian alur pelayaran	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
85	Peningkatan pengelolaan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelayaran	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
86	Pemasangan tanda batas dan rambu pelayaran	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
87	Pengembangan jalur pelayaran dan armada pelayaran	0	-	0	-	0	0	0	Tidak Signifikan
88	Peningkatan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
89	Sosialisasi dan pengendalian dampak pencemaran akibat limbah kapal	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
	Pipa/Kabel Bawah Laut				,			,	_
90	Sosialisasi alur pipa/kabel bawah laut	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
91	Pemantauan dan pemeliharaan alur pipa/kabel bawah laut	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
	Migrasi Biota Laut								
92	Kajian identifikasi, alur, pola migrasi, dar tingkah laku jenis-jenis mamalia laut dar biota besar lainnya		0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
93	Pelibatan dan peningkatan pemahama seluruh lapisan masyarakat terhada berbagai karakteristik mamalia laut da biota besar lainnya		0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
94	Pengembangan sistem monitoring alur migrasi penyu dan biota besar lainnya	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan



NI -	Marakan IZDD	D	amp	N:1-:					
No	Muatan KRP	a	b	С	d	e	f	g	Nilai
95	Peningkatan peran serta masyarakat dalam monitoring alur migrasi penyudan biota besar lainnya	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
96	Integrasi dan mensinergikan alur penyu dan biota besar lainnya dengan aktivitas pelayaran, perikanan, pariwisata dan pemanfaatan ruang laut lainnya	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan

Keterangan:

- a. Perubahan Iklim
- b. Kerusakan, Kemerosotan, dan/atau Kepunahan biodiversity
- c. Peningkatan intensitas & cakupan wilayah banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan
- d. Penurunan mutu dan kelimpahan SDA
- e. Peningkatan alih fungsi Kawasan Hutan dan/atau lahan
- f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat
- g. Peningkatan resiko tehadap kesehatan dan keselamatan manusia

Setelah dilakukan penilaian skor, ditetapkan bahwa muatan KRP yang berdampak terdapat 8 (delapan) program **Tabel 4.8.**

Tabel 4.7 Hasil Identifikasi KRP Yang Berdampak

No.	KRP Berdampak
I	Zona Pariwisata
1	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata bahari
II	Zona Pemukiman
2	Pembangunan dan pengembangan pemukiman nelayan di Kota Bandar Lampung
III	Zona Pelabuhan
3	Pembangunan Pelabuhan laut dan Perikanan
4	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan perikanan
IV	Zona Pertambagan
5	Pengembangan Eksplorasi dan Eksploitasi kawasan pertambahan yang berwawasan lingkungan
IV	Zona Perikanan Tangkap
6	Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap
V	Zona Perikanan Budi Daya
7	Pengembangan budi daya laut yang berbasis masyarakat



No.	KRP Berdampak
VI	Zona Industri
8	Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Industri Maritim (KIM) di
	Tanggamus



4.2.5 Hasil dan Pembahasan Tahap Analisis Pengaruh Hasil Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas dan Hasil identifikasi Materi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program di Wilayah Kajian RZWP3K Provinsi

Hasil uji silang KRP yang berdampak dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 pada Pasal 11 dapat dilihat pada Tabel 4.8 dibawah ini.

Tabel 4.8 Uji Silang KRP dan Isu Prioritas

	Materi Muatan KRP yang		Isu Pe	mbangu	ınan B	erkela	njutan	Priorita	as		
No.	Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Lingkungan Hidup	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ket
1	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata bahari	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Perlu kajian muatan
2	Pembangunan dan pengembangan pemukiman nelayan di Kota Bandar Lampung	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Perlu kajian muatan
3	Pembangunan Pelabuhan laut dan Perikanan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Perlu kajian muatan
4	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan perikanan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Perlu kajian muatan
5	Pengembangan Eksplorasi dan Eksploitasi kawasan pertambahan yang berwawasan lingkungan	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Perlu kajian muatan
6.	Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Perlu kajian muatan
7	Pengembangan budidaya laut yang berbasis masyarakat	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Perlu kajian muatan
8	Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Industri Maritim (KIM) di Tanggamus	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Perlu kajian muatan



Keterangan:

Isu Prioritas:

- 1. Pencemaran dan degradasi habitat
- 2. Potensi rawan bencana
- 3. Penggunaan alat tangkap ikan yang merusak/ilegal fishing
- 4. Ketaatan dan penegakan hukum masih rendah
- 5. Potensi konflik sosial dan kepentingan (*conflict of interest*) dan tumpang tindih antar sektor dan stakeholders
- 6. Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- 7. Kualitas SDM pesisir dan pulau-pulau kecil rendah
- 8. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
- 9. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang belum optimal.

4.2.6 Perkajian Program Yang Berpengaruh, Bentuk Pengaruh Terhadap Rencana Zonasi/Lokasi

Dari hasil analisis pengaruh antara KRP dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas didapatkan 8 (delapan) program yang berpengaruh. Adapun program yang berpengaruh tersebut terhadap Indikasi Rencana Lokasi/Pemanfaatan Ruang RZWP-3-K Provinsi Lampung disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.9 Program yang Berpengaruh, Isu Prioritas Terhadap Rencana Lokasi/ Pemanfaatan Ruang RZWP-3-K Provinsi Lampung

No.	Program Program yang Berpengaruh	Isu Prioritas	Zona	Lokasi Eksisting dan Perencanaan Pengembangan pada Zona
1	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata bahari	 Pencemaran dan degradasi habitat Potensi rawan bencana Penggunaan alat tangkap ikan yang merusak/ilegal fishing Ketaatan dan penegakan hukum masih rendah Potensi konflik sosial dan kepentingan (conflict of interest) dan tumpang tindih antar sektor dan stakeholders 	Pariwisata	 Kabupaten Lampung Selatan (Kecamatan Rajabasa, Bakauheni, Ketapang, Kalianda) Kota Bandar Lampung (Teluk Betung Barat, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Selatan, Bumi Waras) Kabupaten Pesawaran (Kecamatan Punduh Pidada, Padang Cermin) Kabupaten Pesisir Barat (Kecamatan Krui Selatan, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan)



			T	
No.	Program Program yang Berpengaruh	Isu Prioritas	Zona	Lokasi Eksisting dan Perencanaan Pengembangan pada Zona
		 6. Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 7. Kualitas SDM pesisir dan pulau-pulau kecil rendah 8. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 		
		9. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang belum optimal		
2	Pembangunan dan pengembangan pemukiman	 Pencemaran dan degradasi habitat Potensi rawan bencana 	Pemukiman	Kota Bandar Lampung (Kecamatan Telukbetung Timur, Telukbetung Selatan, Bumi Waras)
	nelayan di Kota Bandar Lampung	3. Penggunaan alat tangkap ikan yang merusak/ilegal fishing		
		4. Ketaatan dan penegakan hukum masih rendah		
		5. Potensi konflik sosial dan kepentingan (conflict of interest) dan tumpang tindih antar sektor dan stakeholders		
		 Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 		
		 Kualitas SDM pesisir dan pulau-pulau kecil rendah 		
		8. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil		
		 Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang belum optimal 		
3	Pembangunan Pelabuhan laut dan Perikanan	Pencemaran dan degradasi habitat	Pelabuhan	Kabupaten Tulang Bawang (Kecamatan Dente Teladas)



No.	Program Program yang Berpengaruh	Isu Prioritas	Zona	Lokasi Eksisting dan Perencanaan Pengembangan pada Zona
4	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan perikanan	 Potensi rawan bencana Penggunaan alat tangkap ikan yang merusak/ilegal fishing Ketaatan dan penegakan hukum masih rendah Potensi konflik sosial dan kepentingan (conflict of interest) dan tumpang tindih antar sektor dan stakeholders Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kualitas SDM pesisir dan pulau-pulau kecil rendah Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang belum optimal Pencemaran dan degradasi habitat Potensi rawan bencana Penggunaan alat tangkap ikan yang merusak/ilegal fishing Ketaatan dan penegakan hukum masih rendah 	Pelabuhan	 Kabupaten Lampung Timur (Kecamatan Labuan Maringgai) Kabupaten Lampung Selatan (Kecamatan Bakauheni, Rajabasa, Ketibung, Kalianda, Ketapang, Sidomulyo, Sragi). Kota Bandar Lampung (Kecamatan Panjang, Telukbetung, Telukbetung Timur) Kabupaten Pesawaran (Kecamatan Punduh Pidada, Padang Cermin) Kabupaten Tanggamus (Kecamatan Kota Agung, Limau, Semaka, Pematang Sawa, Cukuh Balak, Klumbayan, Kota Agung Timur)
		5. Potensi konflik sosial dan kepentingan (conflict of interest) dan tumpang tindih antar sektor dan stakeholders		



No.	Program Program yang Berpengaruh	Isu Prioritas	Zona	Lokasi Eksisting dan Perencanaan Pengembangan pada Zona
		 6. Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 7. Kualitas SDM pesisir dan pulau-pulau kecil rendah 8. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 9. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang belum optimal 		
5	Pengembangan Eksplorasi dan Eksploitasi kawasan pertambahan yang berwawasan lingkungan	optimal 1. Pencemaran dan degradasi habitat 2. Potensi rawan bencana 3. Penggunaan alat tangkap ikan yang merusak/ilegal fishing 4. Ketaatan dan penegakan hukum masih rendah 5. Potensi konflik sosial dan kepentingan (conflict of interest) dan tumpang tindih antar sektor dan stakeholders 6. Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 7. Kualitas SDM pesisir dan pulau-pulau kecil rendah 8. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 9. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang belum optimal	Pertamba	Kabupaten Lampung Timur (Labuan Maringgai)



	T	T		
No.	Program Program yang Berpengaruh	Isu Prioritas	Zona	Lokasi Eksisting dan Perencanaan Pengembangan pada Zona
6	Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap	 Pencemaran dan degradasi habitat Potensi rawan bencana Penggunaan alat tangkap ikan yang merusak/ilegal fishing Ketaatan dan penegakan hukum masih rendah Potensi konflik sosial dan kepentingan (conflict of interest) dan tumpang tindih antar sektor dan stakeholders Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kualitas SDM pesisir dan pulau-pulau kecil rendah Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang belum optimal 	Perikanan Tangkap	Seluruh Kecamatan Pesisir di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
7	Pengembangan budi daya laut yang berbasis masyarakat	 Pencemaran dan degradasi habitat Potensi rawan bencana Penggunaan alat tangkap ikan yang merusak/ilegal fishing Ketaatan dan penegakan hukum masih rendah Potensi konflik sosial dan kepentingan (conflict of interest) dan tumpang tindih antar sektor dan stakeholders Terbatasnya sarana dan prasarana di 	Perikanan Budi Daya	 Kabupaten Lampung Timur (Kecamatan Pasir Sakti, Labuan Maringgai). Kabupaten Lampung Selatan (Kecamatan Sragi, Ketapang, Rajabasa, Bakauheni, Kalianda, Ketibung). Kabupaten Pesawaran (Kecamatan Padang Cermin, Mega Punduh, Punduh Pidada) Kota Bandar Lampung (Kecamatan Telukbetung Barat Telukbetung Timur, Bumi Waras) Kabupaten Tanggamus (Kecamatan Pematang Sawa, Cukuh Balak, Kelumbayan)



No.	Program Program yang Berpengaruh	Isu Prioritas	Zona	Lokasi Eksisting dan Perencanaan Pengembangan pada Zona
		wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil		
		Kualitas SDM pesisir dan pulau-pulau kecil rendah		
		8. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil		
		 Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang belum optimal 		
8	Pengembangan sarana dan prasarana	 Pencemaran dan degradasi habitat Potensi rawan 	Industri	Kabupaten Tanggamus (Kecamatan Limau dan Kecamatan Cukuh Balak)
	Kawasan bencana			
	Industri Maritim (KIM) di Tanggamus	3. Penggunaan alat tangkap ikan yang merusak/ilegal fishing		
		4. Ketaatan dan penegakan hukum masih rendah		
		5. Potensi konflik sosial dan kepentingan (conflict of interest) dan tumpang tindih antar sektor dan stakeholders		
		 Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 		
		7. Kualitas SDM pesisir dan pulau-pulau kecil rendah		
		8. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil		
		 Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang belum optimal 		



4.3 HASIL DAN PEMBAHASAN TAHAP KAJIAN MUATAN KLHS

Kajian muatan KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 pada Pasal 13.

4.3.1. Luasan Rencana/Kegiatan Program Pembangunan

Alokasi ruang pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari alokasi ruang eksisting dan rencana. Luasan Eksisting dan rencana kegiatan pada alokasi ruang di Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung tertera pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.10 Luasan Rencana/Kegiatan Program Pembangunan

1. ZONA PARIWISATA (KPU-W)

- 1.1 Sub Zona Wisata Alam Bentang Laut (KPU-W-BL)
- 1.2 Sub Zona Wisata Alam Bawah Laut (KPU-W-ABL)
- 1.3 Sub Zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KPU-W-P3K)
- 1.4 Sub Zona Wisata Olah Raga Air (KPU-W-OR)

No	Sub Zona	Luas (Ha)	Lokasi		
NO	Sub Zolia	Luas (na)	Desa/Kec.	Kab./Kota	
1	Wisata Alam Bentang Laut	23.911,12			
	- Canti - Sebesi	22.366,09	Rajabasa	Lampung Selatan	
	- Pantai Belebu	162,65	Bakauheni	Lampung Selatan	
	- Pulau Mundu	218,02	Ketapang	Lampung Selatan	
	- Teluk Merak Belantung	998,76	Kalianda	Lampung Selatan	
	- Pesisir Barat	165,6	Walur, Krui Selatan	Pesisir Barat	
2	Wisata Alam Bawah Laut	680,32			
	- Pulau Tanjung Putus	7,88	Punduh Pidada	Pesawaran	
	- Pulau Legundi	9,32	Punduh Pidada	Pesawaran	
	- Pulau Lok	269,81	Punduh Pidada	Pesawaran	
	- Gosong Ringgung	78,5	Padang Cermin	Pesawaran	
	- Pulau Tegal	57,83	Padang Cermin	Pesawaran	
	- Pulau Maitem	14,97	Padang Cermin	Pesawaran	
	- Pulau Kelagian	76,21	Padang Cermin	Pesawaran	
	- Pulau Pahawang	29,36	Punduh Pidada	Pesawaran	
	- Pulau Pahawang	68,07	Punduh Pidada	Pesawaran	
	- Pulau Pahawang	23,77	Punduh Pidada	Pesawaran	
	- Pulau Tanjung Putus	44,6	Punduh Pidada	Pesawaran	
3	Wisata Alam Pantai/Pesisir	347,87			
_	dan Pulau-Pulau Kecil	46.71	D 11 D:1 1	D	
	- Pulau Lelangga	16,71	Punduh Pidada	Pesawaran	



Ma	Cub Zono	Luca (Ha)	Loka	asi
No	Sub Zona	Luas (Ha)	Desa/Kec.	Kab./Kota
	- Pantai Duta Wisata	26,99	Teluk Betung Barat	Bandar Lampung
	- Pantai Tirtayasa	13,18	Teluk Betung Barat	Bandar Lampung
	- Pantai Duta Wisata	54,55	Teluk Betung Barat	Bandar Lampung
	- Pantai Ringgung	52,26	Padang Cermin	Pesawaran
	- Pulau Kubur	16,16	Telukbetung Barat	Bandar Lampung
	- Pulau Tangkil-Sukajaya Lempasing	10,83	Padang Cermin	Pesawaran
	- Pantai Labuhan Jukung Krui	157,19	Pesisir Tengah	Pesisir Barat
4	Wisata Olah Raga Air	912,5		
	- Pantai Mutun	29,4	Ketapang	Pesawaran
	- Pantai Ringgung	18,76	Padang Cermin	Pesawaran
	- Tanjung Setia	864,34	Pesisir Selatan	Pesisir Barat

2. ZONA PERMUKIMAN (KPU-PM)

2.1 Sub Zona Permukiman Nelayan (KPU-PM-N)

No	Cub Zono	Luas	Lokasi	
No	Sub Zona	(Ha)	Kec.	Kab./Kota
1	Permukiman Nelayan	11,65		
	- Kota Karang	1,06	Kota Karang Telukbetung Timur	Bandar Lampung
	- Umbul Asem	1,10	Keteguhan Telukbetung Timur	Bandar Lampung
	- Cungkeng	1,16	Kota Karang Telukbetung Timur	Bandar Lampung
	- Gudang Agen	1,05	Gudang Agen Telukbetung Selatan	Bandar Lampung
	- Gudang Lelang	3,05	Gudang Lelang Bum Waras	Bandar Lampung
	- Kangkung	1,09	Kangkung Bumi Waras	Bandar Lampung
	- Bumi Waras	3,14	Bumi Waras	Bandar Lampung



3. ZONA PELABUHAN (KPU-PL)

- 3.1 Sub Zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKp) dan Sub Zona Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKr) (KPU-PL-DLK)
 3.2 Sub Zona Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) (KPU-PL-WKO)

	0.1.7	. (11.)	Lokasi	
No	Sub Zona	Luas (Ha)	Desa/Kec.	Kab./Kota
1.	Daerah Lingkungan Kerja (DLKp) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)	32.394,67		
	DLKp/DLKr Pelabuhan Panjang	3.866,05	Panjang	Bandar Lampung
	- Wilayah Perairan		Panjang	Bandar Lampung
	DLKp/DLKr Pelabuhan Kota Agung	19.110,00	Kota Agung	Tanggamus
	DLKp/DLKr Bakauheni	1.483,30		
	- Wilayah Perairan		Bakauheni	Lampung Selatan
	DLKp/DLKr RIP Pelabuhan Panjang	7.384,46	Panjang	Bandar Lampung
	DLKp / DLKr Rencana Pelabuhan Sebesi	335,11	Rajabasa	Lampung Selatan
	DLKp / DLKr Rencana Pelabuhan Sebalang	203,03	Katibung	Lampung Selatan
	Pelabuhan Utama			
	- Pelabuhan Panjang		Panjang	Bandar Lampung
	Pelabuhan Pengumpul			
	- Pelabuhan Kota Agung		Kota Agung	Tanggamus
	- Pelabuhan Sebalang		Katibung	Lampung Selatan
	- Pelabuhan Batu Balai		Limau	Tanggamus
	- Pelabuhan Teluk Betung		Teluk Betung	Bandar Lampung
	- Pelabuhan Bakauheni		Bakauheni	Lampung Selatan
	Pelabuhan Pengumpan:			
	Pelabuhan Pengumpan Regional :			
	- Pelabuhan Sebesi		Rajabasa	Lampung Selatan
	- Pelabuhan Tabuhan		Cukuh Balak	Tanggamus
	- Pelabuhan Klumbayan		Klumbayan	Tanggamus
	- Pelabuhan Legundi		Punduh Pidada	Pesawaran
	- Pelabuhan Maringgai		Labuhan Maringgai	Lampung Timur
	- Pelabuhan Kuala Penet		Labuhan Maringgai	Lampung Timur
	- Pelabuhan Teladas		Dente Teladas	Tulang Bawang
	Pelabuhan Pengumpan Lokal :	-		
	- Pelabuhan Krui		Krui	Pesisir Barat
	- Pelabuhan Kalianda		Kalianda	Lampung Selatan
	Terminal Khusus:	-		
	Eksisting Lokasi Terminal Khusus :			
	- Wahana Pasir Sakti (Pertambangan Pasir)		Ketapang	Lampung Selatan



No	Sub Zona	Luas (Ha)		Lokasi
INO	Sub Zona	Luas (na)	Desa/Kec.	Kab./Kota
	- Batu Dewata Alam Persada		Ketapang	Lampung Selatan
	(Pertambangan Pasir)		Retapang	Lampung Selatan
	- Wijaya Karya Beton		Ketapang	Lampung Selatan
	(Pertambangan Pasir/Beton)		Retapang	Lampung Selatah
	- Rezeki Karunia Alam		Ketapang	Lampung Selatan
	(Pertambangan Pasir)		Retapang	Lampung Selatah
	- Bandar Bakau Jaya			
	(Pengelolaan Terminal dan		Bakauheni	Lampung Selatan
	Fasilitas Pelabuhan Lainnya)			
	- Raja Kapal (Galangan		Bakauheni	Lampung Selatan
	Kapal)		Dakaunem	Dampung Sciatan
	- Rajabasa Kedaton Makmur			
	(Pertambangan Batu		Rajabasa	Lampung Selatan
	Andersit)			
	- Supreme Energy Raja		Rajabasa	Lampung Selatan
	(PLTP)		Rajabasa	Lampung Sciatan
	- PLN PLTU Lampung, Desa		Katibung	Lampung Selatan
	Sebalang		Ratibung	Earnpung Sciatum
	- Semen Padang Desa Rangai		Katibung	Lampung Selatan
	Tritunggal (Industri Semen)		Ratibung	Lampung belatan
	- Holcim Desa Rangai			
	Tritunggal (Industri		Katibung	Lampung Selatan
	CPO/Minyak Sawit)			
	- Sumber Indah Perkasa		Katibung	Lampung Selatan
	Desa Rangai Tritunggal		natibung	Dampung belatan
	Rencana untuk Lokasi			
	Terminal Khusus :			
	- Kelumbayan		Kelumbayan	Tanggamus
	- Wonosobo		Wonosobo	Tanggamus
	- Limau		Limau	Tanggamus
	- Putih Doh		Cukuh Balak	Tanggamus
	- Teluk Paku		Kelumbayan	Tanggamus
	- Teluk Umbar		Kelumbayan	Tanggamus
	- Indocemen Desa Rangai		Katibung	Lampung Selatan
	Tritunggal			
	- Way Muli Rajabasa		Rajabasa	Lampung Selatan
	- Blebuk		Totoharjo	Lampung Selatan
			Bakauheni	
-	- Pantai Sudul Suka Marga		Sidomulyo	Lampung Selatan
	- Labuhan Maringgai		Labuhan	Lampung Timur
	00-		Maringgai	1 0
	- Pagar Jaya Punduh Pidada		Punduh	Pesawaran
			Pidada	
-	Terminal Umum	40.50	D.I. I.	
	- Banndar Bakau Jaya	12,72	Bakauheni	Lampung Selatan
2	Wilayah Kerja Operasional	7 (10 54		
2	Pelabuhan Perikanan	7.613,54		
	(WKOPP)		Talula Datara	<u> </u>
	- PPP Lempasing	31,03	Teluk Betung	Bandar Lampung
-			Timur	2 -
	- PPP Kota Agung	32,52	Kota Agung	Tanggamus
	- PPP Labuhan Maringgai	205,60	Maringgai	Lampung Timur
	- PPP Teladas	1.311,46	Dente Teladas	Tulang Bawang



No	Cub Zono	Luca (Ha)	Lokasi		
No	Sub Zona	Luas (Ha)	Desa/Kec.	Kab./Kota	
	- PPI Krui	291,11	Pesisir Tengah	Pesisir Barat	
	- PPI Bengkunat	3.159,59	Bengkunat Belimbing	Pesisir Barat	
	- PPI Guring	197,54	Pematang Sawa	Tanggamus	
	- PPI Karang Anyar	76,80	Kota Agung Timur	Tanggamus	
	- PPI Tegineneng	16,58	Limau	Tanggamus	
	- PPI Badak	134,75	Limau	Tanggamus	
	- PPI Putih Doh	261,12	Cukuh Balak	Tanggamus	
	- PPI Penyandingan	735,46	Kelumbayan	Tanggamus	
	- PPI Durian	108,58	Padang Cerming	Pesawaran	
	- PPI Rangai	37,26	Katibung	Lampung Selatan	
	- PPI Kalianda	186,05	Kalianda	Lampung Selatan	
	- PPI Way Muli	86,79	Rajabasa	Lampung Selatan	
	- PPI Kunjir	160,98	Rajabasa	Lampung Selatan	
	- PPI Muara Piluk	6,58	Bakauheni	Lampung Selatan	
	- PPI Ketapang	12,92	Ketapang	Lampung Selatan	
	- PPI Kuala Jaya	406,61	Sragi	Lampung Selatan	
	- PPI Kuala Penet	154,21	Labuhan Maringgai	Lampung Timur	

4. ZONA PERTAMBANGAN (KPU-TB)

4.1 Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (KPU-TB-MG)

No	Sub Zona	Luca (IIa)	Lok	asi
No	Sub Zona	Luas (Ha)	Desa/Kec.	Kab./Kota
1.	Minyak dan Gas Bumi	12.585,53		
		965,41	Labuhan Maringgai	Lampung Timur
		901,18	Labuhan Maringgai	Lampung Timur
		920,94	Labuhan Maringgai	Lampung Timur
		1.198,58	Labuhan Maringgai	Lampung Timur
		575,92	Labuhan Maringgai	Lampung Timur
		761,71	Labuhan Maringgai	Lampung Timur
		148,34	Labuhan Maringgai	Lampung Timur
		1.282,51	Labuhan Maringgai	Lampung Timur
		1.282,51	Labuhan Maringgai	Lampung Timur
		2.798,44	Labuhan Maringgai	Lampung Timur
		467,48	Labuhan Maringgai	Lampung Timur
		1.282,51	Labuhan Maringgai	Lampung Timur

5. ZONA PERIKANAN TANGKAP (KPU-PT)

- 5.1 Sub Zona Pelagis (KPU-PT-P)
- 5.2 Sub Zona Demersal dan Pelagis (KPU-PT-DP)

No	No Sub Zona Luas (Ha		Lokasi		
NO	Sub Zolia	Luas (Ha)	Desa/Kec.	Kab./Kota	
1.	Pelagis	985.104,91			
		349.799,10	Perairan Barat Lampung	Pesisir Barat	
		156.591,75	Teluk Semaka	Tanggamus	



No. Cub Zono Luco		Luca (Ha)	Lokasi		
No	Sub Zona	Luas (Ha)	Desa/Kec.	Kab./Kota	
				Pesaswaran, Bandar	
		285.357,57	Teluk Lampung	Lampung, Lampung	
				Selatan	
		193.356,49	Perairan Timur	Lampung Timur	
		193.330,49	Lampung	Lampung Imiui	
2.	Pelagis dan Demersal	233.301,07	Perairan Timur	Lampung Timur	
۷.	relagis dali Delliei sai	233.301,07	Lampung	Lampung Timur	

6. ZONA PERIKANAN BUDI DAYA (KPU-BD)

6.1 Sub Zona Budi Daya Laut (KPU-BD-BL)

			Lol	kasi
No	Sub Zona	Luas (Ha)	Desa/Kec.	Kab./Kota
			•	,
1.	Budidaya Laut	70.616,60		
	- Mutun	137,51	Padang Cermin	Pesawaran
	- Teluk Hurun	493,61	Padang Cermin	Pesawaran
	- Teluk Hurun	176,61	Pandang Cermin	Pesawaran
	- Ringgung – Teluk Pandan	30,29	Padang Cermin	Pesawaran
	- Ringgung – Teluk Pandan	18,87	Padang Cermin	Pesawaran
	- Teluk Cikuyiyi - Teluk Pandan	98,54	Padang Cermin	Pesawaran
	- Ketapang - Teluk Pandan	97,71	Padang Cermin	Pesawaran
	- Pulau Tegal bagian Utara - Teluk Pandan	221,50	Padang Cermin	Pesawaran
	- Pulau Tegal bagian Timur – Teluk Pandan	33,02	Padang Cermin	Pesawaran
	- Kampung Durian-Padang Cermin	346,16	Pandang Cermin	Pesawaran
	- Kampung Durian-Padang Cermin	230,71	Padang Cermin	Pesawaran
	- Kalangan-Pulau Pahawang	574,43	Marga Punduh	Pesawaran
	- Pulau Pahawang	969,90	Marga Punduh	Pesawaran
	- Sukarame	812,12	Punduh Pidada	Pesawaran
	- Sukamaju	1.303,08	Punduh Pidada	Pesawaran
	- Pulau Balak dan Pulau Lok	1.060,29	Punduh Pidada	Pesawaran
	- Tajur	1.135,40	Marga Punduh	Pesawaran
	- Pulau Siuncal	1,66	Punduh Pidada	Pesawaran
	- Pulau Legundi	570,85	Punduh Pidada	Pesawaran
	- Sragi	6.183,11	Sragi	Lampung Selatan
	- Bandar Agung	1.609,90	Sragi	Lampung Selatan
	- Pulau Seram	1.045,17	Ketapang	Lampung Selatan
	- Ketapang	432,75	Ketapang	Lampung Selatan
	- Ketapang	1.471,03	Ketapang	Lampung Selatan
	- Ketapang	381,84	Ketapang	Lampung Selatan
	- Ketapang	767,81	Ketapang	Lampung Selatan
	- Ketapang	1.052,09	Ketapang	Lampung Selatan
	- Legundi	826,77	Ketapang	Lampung Selatan
	- Legundi	296,82	Ketapang	Lampung Selatan
	- Legundi	962,83	Ketapang	Lampung Selatan
	- Darmayoga	713,27	Ketapang	Lampung Selatan



No	Sub Zona	Luas (Ha)	Lokasi		
NU	Sub Zolla	Luas (Ha)	Desa/Kec.	Kab./Kota	
	- Darmayoga	369,60	Ketapang	Lampung Selatan	
	- Ruguk	534,98	Ketapang	Lampung Selatan	
	- Ruguk	108,26	Ketapang	Lampung Selatan	
	- Sumur	550,78	Ketapang	Lampung Selatan	
	- Sebesi	5,12	Rajabasa	Lampung Selatan	
	- Pulau Sebuku	98,94	Rajabasa	Lampung Selatan	
	- Pulau Sebuku	103,17	Rajabasa	Lampung Selatan	
	- Pulau Sebuku	98,37	Rajabasa	Lampung Selatan	
	- Blebu	390,17	Bakauheni	Lampung Selatan	
	- Blebu	563,40	Bakauheni	Lampung Selatan	
	- Kalianda	543,32	Kalianda	Lampung Selatan	
	- Kalianda	592,03	Kalianda	Lampung Selatan	
	- Kalianda	1.318,20	Kalianda	Lampung Selatan	
	- Kalianda	148,22	Kalianda	Lampung Selatan	
	- Kalianda-Merak Blantung	1.049,51	Kalianda	Lampung Selatan	
	- Kota Dalem	104,96	Katibung	Lampung Selatan	
	- Kota Dalem	604,80	Katibung	Lampung Selatan	
	- Karang Bera	11.657,96	Pematang Sawa	Tanggamus	
	- Teluk Tengor	990,60	Cukuh Balak	Tanggamus	
	- Teluk Umbar	1.425,03	Kelumbayan	Tanggamus	
	- Teluk Umbar	210,40	Kelumbayan	Tanggamus	
	- Kelumbayan	602,56	Kelumbayan	Tanggamus	
	- Kelumbayan	444,05	Kelumbayan	Tanggamus	
	- Kelumbayan	915,04	Kelumbayan	Tanggamus	
	- Harnas Lempasing	34,40	Teluk Betung Barat	Bandar Lampung	
	- Kota Karang	101,91	Teluk Betung Timur	Bandar Lampung	
	- Kota Karang	40,06	Teluk Betung Timur	Bandar Lampung	
	- Bumi Waras	68,24	Bumi Waras	Bandar Lampung	
	- Bumi Waras	16,82	Bumi Waras	Bandar Lampung	
	- Bumi Waras	0,28	Bumi Waras	Bandar Lampung	
	- Bumi Waras	2,95	Bumi Waras	Bandar Lampung	
	- Bumi Waras	1,69	Bumi Waras	Bandar Lampung	
	- Margasari	2.620,73	Lahuhan Maringgai	Lampung Timur	
	- Margasari	2.531,05	Lahuhan Maringgai	Lampung Timur	
	- Margasari	3.876,80	Lahuhan Maringgai	Lampung Timur	
	- Margasari	1.167,06	Lahuhan Maringgai	Lampung Timur	
	- Margasari	2.991,90	Lahuhan Maringgai	Lampung Timur	
	- Pasir Sakti	9.677,59	Pasir Sakti	Lampung Timur	

7. ZONA INDUSTRI (KPU-ID)

7.1 Sub Zona Industri Maritim (KPU-ID-MR)

No	Cub Zono	Luca (Ha)	L	okasi
NO	Sub Zona	Luas (Ha)	Desa/Kec.	Kab./Kota
1	Industri Maritim	2.549,11		
	- Limau	2.084,64	Limau	Tanggamus
	- Cukuh Balak	464,47	Cukuh Balak	Tanggamus



1. KAWASAN KONSERVASI

- 1.1 Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K)
- 1.2 Kawasan Konsevasi Perairan (KKP)
- 1.3 Kawasan Suaka Alam

NT -	C 1.7	I (II.)	Lokas	si
No	Sub Zona	Luas (Ha)	Desa/Kec.	Kab./Kota
1	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau			
1	Kecil (KKP3K)			
	Taman Pesisir/Taman Pulau Kecil :	121.278,32		
	- Taman Pesisir Ngambur	3.924,56	Ngambur	Pesisir Barat
	- Taman Pulau Betuah	52.978,61	Bengkunat Belimbing	Pesisir Barat
	Taman Pulau Batang Segama :	51.623,10		
	- Zona Inti	1.329,92	P. Batang Labuhan Maringgai	Lampung Timur
	- Zona Pemanfaatan Terbatas	25.272,51	P. Batang Labuhan Maringgai	Lampung Timur
	- Zona Lainnya	11,55	P. Batang Labuhan Maringgai	Lampung Timur
	- Pulau Sekepel-Pulau Mengkudu	2.850,29	Ketapang	Lampung Selatan
	- Pulau Kandang Balak - Pulau Panjurit	316,81	Bakauheni	Lampung Selatan
	- Pulau Sebesi	10,59	Rajabasa	Lampung Selatan
		5,73	Rajabasa	Lampung Selatan
		6.675,28	Rajabasa	Lampung Selatan
		26,05	Rajabasa	Lampung Selatan
		35,72	Rajabasa	Lampung Selatan
	- Ketapang-Sragi	294,80	Ketapang-Sragi	Lampung Selatan
	- Pulau Kubur	211,58	Telukbetung Barat	Bandar Lampung
	- Suak Panjang Pulau Pahawang	56,20	Punduh Pidada	Pesawaran
	- Pulau Tegal	29,52	Padang Cermin	Pesawaran
	- Dusun Pahawang Lunik	66,93	Punduh Pidada	Pesawaran
	- Dusun Suak Panjang	56,20	Punduh Pidada	Pesawaran
	- Pulau Siuncal	314,27	Punduh Pidada	Pesawaran
	- Ekosistem Mangrove	1.802,08		
		6,83	Kota Karang Telukbetung Timur	Bandar Lampung
		20,49	Gudang Agen Penengahan Telukbetung Selatan	Bandar Lampung
	_	8,86	Padang Cermin	Pesawaran
		25,12	Padang Cermin	Pesawaran
	_	17,82	Padang Cermin	Pesawaran
		3,53	Padang Cermin	Pesawaran
		1,89	Padang Cermin	Pesawaran
		13,01	Padang Cermin	Pesawaran
		116,47	Padang Cermin	Pesawaran
		32,36	Punduh Pidada	Pesawaran
		57,55	Punduh Pidada	Pesawaran



			Lokasi		
No	Sub Zona	Luas (Ha)	Desa/Kec.	Kab./Kota	
		14,86	Punduh Pidada	Pesawaran	
		3,96	Punduh Pidada	Pesawaran	
		60,51	Punduh Pidada	Pesawaran	
		38,61	Punduh Pidada	Pesawaran	
		8,02	Punduh Pidada	Pesawaran	
		1,60	Punduh Pidada	Pesawaran	
		202,61	Punduh Pidada	Pesawaran	
		60,27	Kalianda	Lampung Selatan	
		12,43	Bakauheni	Lampung Selatan	
		7,07	Bakauheni	Lampung Selatan	
		10,44	Bakauheni	Lampung Selatan	
		6,81	Bakauheni	Lampung Selatan	
		13,69	Bakauheni	Lampung Selatan	
		6,82	Bakauheni	Lampung Selatan	
		5,17	Pulau Sebesi Rajabasa	Lampung Selatan	
		15,22	Ketapang	Lampung Selatan	
		1,74	Ketapang	Lampung Selatan	
		6,79	Ketapang	Lampung Selatan	
		12,50	Ketapang	Lampung Selatan	
		4,25	Sragi	Lampung Selatan	
		12,04	Sragi	Lampung Selatan	
		5,51	Ketapang	Lampung Selatan	
		367,15	Pasir Sakti	Lampung Timur	
		1,23	Labuhan Maringgai	Lampung Timur	
		344,68	TNWK Labuhan Maringgai	Lampung Timur	
		274,17	Dente Teladas	Tulang Bawang	

2. KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKP)

- 2.1 Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan P. Tabuan (KKP-TWP-KT)
- 2.2 Kawasan Konservasi Perairan Way Kambas (KKP-WK)

No	Sub Zona	Luca (Ha)	Lokasi		
No	Sub Zona	Luas (Ha)	Desa/Kec.	Kab./Kota	
1	Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan - P. Tabuan	136.611,54			
	- Zona Inti	8.824,22	Kelumbayan	Tanggamus	
		138,57	Kelumbayan	Tanggamus	
	- Zona Perikanan Berkelanjutan	35.948,44	Sekitar Pulau Tabuan	Tanggamus	
		22.074,26	Cukuh Balak	Tanggamus	
	- Zona Pemanfaatan	8.093,76	Kelumbayan	Tanggamus	
		1.135,08	Sekitar Pulau Tabuan	Tanggamus	
	Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan - P. Tabuan				
	(Koordinat Titik Ikat)				
2	Kawasan Konservasi Perairan Way Kambas	60.397,21	Labuhan Maringgai	Labuhan Maringgai	



3. KAWASAN SUAKA ALAM

- 3.1 Cagar Alam dan Cagar Alam Laut Kepulauan Krakatau (KSA-CA-CAL-1)
- 3.2 Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan (KSA-CAL-2)

No	Sub Zona	Luce (He)	Lokasi		
NO	Sub Zona	Luas (Ha)	Desa/Kec.	Kab./Kota	
1	CA dan CAL Kepulauan Krakatau	13.735,10	Rajabasa	Lampung Selatan	
	- SK Menhutbun No. 256/KPTS-II/2000	11.200,00	Rajabasa	Lampung Selatan	
	- SK Menteri Kehutanan No. 85/Kpts- II/1990	2.535,10	Rajabasa	Lampung Selatan	
2	Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan	17.820,90	Lemong	Pesisir Barat	
	- SK Menhutbun No. 256/KPTS-II/2000		Lemong	Pesisir Barat	

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

1. KAWASAN STRATEGISNASIONAL TERTENTU

1.1 Pulau Kecil Terluar Pulau Betuah (KSNT-PB)

No	Sub Zono Luas	Luas	Lol	Lokasi	
NO	Sub Zona	(Ha)	Desa/Kec.	Kab./Kota	
1	Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)				
	Pulau Kecil Terluar Pulau Betuah	73.896,12	Bengkunat Belimbing	Pesisir Barat	

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

1. KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

- 1.1 Daerah Latihan Militer Teluk Lampung (KSN-TL-1)
- 1.2 Kawasan Selat Sunda (KSN-KSS-2)

No	Cub Zono	Luca (Ha)	Lokasi		
NO	Sub Zona	Luas (Ha)	Desa/Kec.	Kab./Kota	
1	Daerah Latihan Militer Teluk Lampung	35.194,52	Padang Cermin	Pesawaran	
2	Kawasan Selat Sunda (KSS)				

ALUR LAUT (AL)

1. ALUR PELAYARAN (AL-AP)

- 1.1 Alur Pelayaran Internasional (AL-AP-PI)
- 1.2 Alur Pelayaran Nasional (AL-AP-PN)
- 1.3 Alur Pelayaran Regional (AL-AP-PR)
- 1.4 Alur Pelayaran Lokal (AL-AP-AL)
- 1.5 Alur Pelayaran Khusus (AL-AP-PK)
- 1.6 Alur Laut Kepulauan Indonesia/ALKI (AL-AP-KI)

No	Sub Zona	Luas (Ha)	Lokasi
1	Alur Pelayaran Internasional		
	Kota Agung		Perairan Teluk Semaka
	Panjang		Perairan Teluk Lampung



No	Sub Zona	Luas (Ha)	Lokasi
			Perairan Teluk Lampung
			Perairan Teluk Lampung
2	Alur Pelayaran Nasional		
	Lempasing		Bandar Lampung
	Perairan Timur Lampung		Lampung Timur
3	Alur Pelayaran Regional		Tanggamus
	Kelumbayan - P. Betuah		Tanggamus
4	Alur Pelayaran Lokal		
	Krui - P. Pisang		Pesisir Barat
	Karya Penggawa Tebakak-P.Pisang		Pesisir Barat
	Tanjung Setia-Siging-Bengkunat		Pesisir Barat
	Way Haru – P. Betuah		Pesisir Barat
	Kota Agung - Pematang Sawa		Tanggamus
	Kota Agung - Cukuh Balak		Tanggamus
	Cukuh Balak – P. Tabuan		Tanggamus
	Ketapang-Pahawang		Lampung Selatan
	Ketapang - Legundi		Lampung Selatan
	Ketapang - P.Siuncal		Lampung Selatan
	Kalianda - Canti-Sebesi		Lampung Selatan
	Bakauheni-Ketapang P.Mundu		Lampung Selatan
	Labuhan Maringgai - P. Segama - P. Batang		Lampung Timur
5	Alur Pelayaran Khusus		
	Bakauheni - Merak		Lampung Selatan
	Merak - Bakauheni		Lampung Selatan
6	Alur Laut Kepulauan Indonesia/ALKI	24.136,28	

2. PIPA/KABEL BAWAH LAUT (AL-APK)

- 2.1 Kabel Optik PT. Telkom (AL-APK-KT)
- 2.2 Jaringan Pipa Gas (AL-APK-PG)
- 2.3 PLN /Transmisi Listrik 500 Kv (APL-APK-PLN)

No	Sub Zona	Luas (Ha)	Lokasi
1	Kabel Optik PT. Telkom	5.849,71	Perairan Kalianda, Lampung Selatan
2	Jaringan Pipa Gas		Perairan Labuhan Maringgai, Lampung Timur
3	PLN /Transmisi Listrik 500 Kv		
	Legundi, Punduh Pidada	7,2km	Perairan Pulau Legundi, Pesawaran
	Pahawang	1,4km	Perairan Pulau Pahawang, Pesawaran
	Pekon Doh, Sawang Balak	15,3km	Perairan Pulau Sawang Balak, Tanggamus
	Pulau Pisang	2,13km	Perairan Pulau Pisang, Pesisir Barat



3. MIGRASI BIOTA LAUT (AL-AMB)

- 3.1 Alur Migrasi Penyu (AL-AMB-PY)
- 3.2 Alur Migrasi Mamalia Laut (AL-AMB-ML)

No	Sub Zona	Lokasi
1	Alur Migrasi Penyu	Perairan Lemong, Pesisir Barat
		Perairan Pematang Sawa, Tanggamus
		Perairan Teluk Semaka
		Perairan Punduh Pidada, Pesawaran
		Teluk Lampung, Bandar Lampung
		Perairan Bakauheni
		Perairan Laut Jawa, Labuhan Maringgai
2	Alur Migrasi Mamalia Laut	Perairan Lemong, Pesisir Barat
		Perairan Pematang Sawa, Tanggamus
		Perairan Teluk Semaka
		Perairan Bakauheni
		Perairan Laut Jawa, Labuhan Maringgai

Dari data penggabungan antara RZWP-3-K Provinsi Lampung dan RTRW Provinsi Lampung tahun 2017, diperoleh hasil Rekapitulasi Luas Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) dan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Wilayah Provinsi Lampung adalah 1.219.256,93 Ha, atau sekitar 36,32% dari total luas Provinsi Lampung. Secara rinci luasan masing-masing kawasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Hal ini di harapkan dapat mendukung proses pemulihan beban pencemar yang masuk ke lingkungan.

Kawasan	Luas (Ha)	%
Cagar Alam	2.882,88	0,09
Cagar Alam Laut	29.020,90	0,86
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K)	121.278,32	3,61
Kawasan Konservasi Perairan (KKP)	136.611,54	4,07
Hutan Lindung	319.651,18	9,52
Hutan Produksi	170.032,54	5,07
Hutan Produksi Terbatas	28.922,36	0,86
Suaka Alam/Pelestarian Alam	1.373,55	0,04
Suaka Margasatwa	4.155,82	0,12
Taman Hutan Rakyat	21.699,32	0,65
Taman Nasional	383.628,52	11,43
Luas Kawasan Hutan, KKP3K & KKP	1.219.256,93	36,32
Luas Provinsi Lampung	3.356.741,13	100



Kajian didasarkan atas isu prioritas, program yang berpengaruh negatif terhadap lingkungan. Indikasi rencana lokasi/pemanfaatan ruang laut yang kemudian dianalisis berdasarkan Jasa Lingkungan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada 7 Kab/Kota wilayah pesisir Lampung melalui jasa ekosistem. Hal ini dilakukan mengingat Provinsi Lampung belum banyak memiliki data Daya Dukung dan Daya Tampung wilayah laut dan pulau-pulau kecil. Analis Overlay Peta yang dilakukandengan Jasa Daya Dukung dan Daya Tampung daratan meliputi:

- Jasa Perubahan Iklim
- Jasa Biodiversitas
- Jasa Pangan
- Jasa Penguraian Limbah
- Jasa Penyediaan Air Bersih
- Jasa Budaya Tempat tinggal dan ruang hidup

Kajian dilakukan melalui tahapan identifikasi pemanfaatan ruang dan jasa lingkungan yang terkait, kemudian overlay dengan lokasi eksisting, rencana lokasi pengembangan dengan peta jasa lingkungan, kesimpulan kesesuaian jasa lingkungan dan dampaknya serta perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan atau program.

4.3.2 Analisis Daya Dukung Lingkungan Pesisir

Konsep daya dukung didasarkan pada pemikiran bahwa lingkungan memiliki kapasitas maksimum untuk mendukung suatu pertumbuhan organisme. Daya dukung merupakan tingkat pemanfaatan sumber daya alam atau ekosistem secara berkesinambungan tanpa menimbulkan kerusakan sumber daya dan lingkungan. Konsep ini dikembangkan terutama untuk mencegah kerusakan atau degradasi dari suatu sumber daya alam dan lingkungan sehingga kelestarian dan fungsinya dapat tetap terwujud dan pada saat yang bersamaan, masyarakat atau pengguna sumber daya tersebut akan tetap berada dalam kondisi sejahtera dan atau tidak dirugikan.



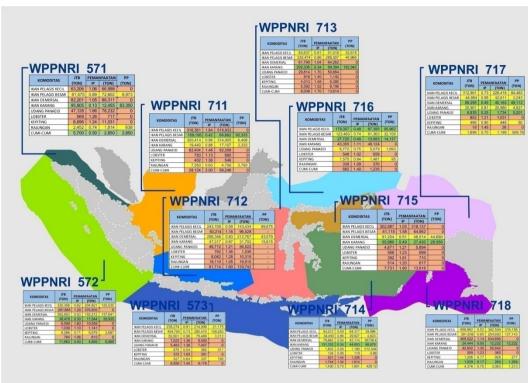
Tujuan dari analisa ini adalah untuk mengetahui daya dukung lingkungan dan kapasitas produksi optimum dari kegiatan yang akan dicanangkan untuk daerah tersebut. Analisa daya dukung yang akan dilakukan berdasarkan masing-masing kegiatan, dalam kasus ini adalah: 1) perikanan tangkap; 2) perikanan budidaya; 3) pariwisata pantai; dan 4) pariwisata snorkling/selam.

A. Daya Dukung Perikanan Tangkap

Potensi perikanan di Provinsi Lampung terbagi dalam tiga kawasan perairan yaitu perairan Samudera Hindia di sebelah barat Sumatera dan Laut Jawa. Dua wilayah ini terletak di dua Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yaitu WPP-NRI 572, yang meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera sampai dengan Selat Sunda, dan WPP-NRI 712 meliputi perairan yang bersentuhan langsung dengan Laut Jawa.

Daerah penangkapan ikan WPP-NRI 572 yang meliputi daerah potensi ikan meliputi perairan sepanjang pantai Kab. Pesisir Barat, Teluk Semaka, Teluk Lampung, Pulau Sebuku, Pulau Sebesi dan Selat Sunda. Daerah Penangkapan ikan demersal WPP-NRI 712 meliputi perairan sepanjang pantai Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tulang Bawang dan sebagian Kabupaten Lampung Selatan.





Gambar 4.1 Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)(Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 47 Tahun 2016).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 47 Tahun 2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan di WPPNRI 572 dan WPPNRI 712 terdapat pada Tabel dibawah ini.

Berdasarkan habitat hidupnya, sumberdaya (finfish) dapat ikan dikelompokkan kedalam dua kategori yaitu ikan pelagis dan ikan demersal. Sumberdaya ikan pelagis adalah ikan yang mempunyai kebiasaan berada dekat permukaan, merupakan ikan peruaya atau tidak menetap di suatu area dan berenang secara terus menerus. Ikan pelagis dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil. Sumberdaya ikan pelagis kecil merupakan ikan neretik yang penyebarannya terutama di perairan dekat pantai, di daerah dimana terjadi proses penaikan massa air (upwelling). Sumberdaya ikan ini dapat membentuk biomassa yang besar (bergerombol) sehingga merupakan sumberdaya yang melimpah di suatu



area. Ikan demersal adalah ikan yang kebiaaan hidupnya berada di dasar perairan atau dekat dasar perairan.

Dari Tabel 4.11 digambarkan bahwa ikan pelagis besar, udang lobster, rajungan, dan cumi-cumi di WPPNRI 712 (Laut Jawa) sudah *over fishing*. Ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, kepiting dan cumi cumi di Samudera Hindia masih ditangkap.

Tabel 4.11 Estimasi Potensi, Jumlah Tangkap Yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan

No	Wilayah Pengelolaan Perikanan	Ikan Pelagis Kecil	Ikan Pelagis Besar*	Ikan Demersal	Ikan Karang	Udang Penaeid	Lobter	Kepiting	Ranjungan	Cumi- Cumi
1	WPPNRI 572 (Samudera Hindia bagian Barat									
	Potensi (ton)	412,945	364,830	366,066	48,098	8,249	1,297	11,582	955	14,579
	JTB (ton)	330,356	21,864	292,853	38,478	6,599	1,037	9,265	764	11,663
	Tingkat Pemanfaatan	0,62	1,29	0,53	0,30	1,60	1,10	0,71	1,06	0,40
2	WPPNRI 712 (La	aut Jawa)								
	Potensi (ton)	303,886	104,017	320,432	59,146	58,390	952	10,637	22,637	102,142
	JTB (ton)	243,109	83,241	256,346	47,317	46,712	762	8,062	18,110	81,714
	Tingkat Pemanfaatan	0,59	1,16	0,83	0,67	1,21	1,36	1,28	1,05	1,60

Keterangan:

Tingkat Pemanfaatan (E).

E < 0,5 = Moderat, upaya penangkapan dapat ditambah,

 $E = 0.5 \le E < 1$ = Fully Exploited, Upaya penangkapan dipertahankan dengan monitor ketat,

 $E \ge 1$ = Over Exploited, upaya penangkapan harus dikurangi

B. Daya Dukung Perikanan Budi Daya

Keberhasilan dari suatu usaha perikanan budi daya sangat ditentukan oleh lingkungan ekologis tempat budi daya itu dilakukan. Ukuran lingkungan ekologis yang tepat bagi organisme yang dibudidayakan bergantung dari daya dukung lingkungan tersebut. Daya dukung adalah kuantitas maksimum biota yang dapat didukung oleh suatu badan air selama jangka waktu yang panjang.

^{*}ikan pelagis besar non Tuna Cakalang



Pemanfaatan di perairan yang tidak dibarengi dengan pengelolaan serta penegakan peraturan yang baik akan mengakibatkan eksploitasi yang tidak terkontrol serta tumpang tindihnya kegiatan pada ruang tertentu dan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Teluk Lampung mempunyai potensi besar dalam budi daya kerapu, kakap, rumput laut dan mutiara. Data data daya dukung budi daya laut di perairan Lampung dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.12 Daya Dukung Budi Daya Perikanan

No	Lokasi	Jenis Budidaya	Daya Dukung	Sumber Pustaka
1	Pulau Puhawang	Keramba Jaring Apung	53.550 ton (39.600 petak dengan ukuran (6x6x3 m)	Yulianto <i>et al</i> . (2015)
2	Pulau Tangkil	Rumput Laut	290,9 ha (726 unit dengan 1 unit terdiri 20 rakit ukuran (5 m x 2,5 m)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2011)
3	Pulau Tangkil	Kerangka Jaring Apung	47,86 ha (3.190.86 unit (ukuran 4 x 4 m)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2011)
4	Pulau Tangkil	Tiram Mutiara	203 ha (13.548 plot unit ukuran (4 x 4 m)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2011)
5	Pulau Tegal dan Pulau Maitem	Rumput Laut	373.3 ha (933 unit dengan 1 unit terdiri 20 rakit ukuran (5 x 2,5 m)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2011)
6	Pulau Tegal dan Pulau Maitem	Keramba Jaring Apung	202,7 ha (13.516 unit)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2011)
7	Pulau Tanjung Putus	Rumput Laut	1.919 ha (2.878 unit)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2011)
8	Pulau Tanjung Putus	Keramba Jaring Apung	279 ha (18,617 unit)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2011)
9	Pulau Tanjung Putus	Tiram Mutiara	77,3 ha (5.154 spot)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2011)
10	Pulau Legundi dan Siuncal	Keramba Jaring Apung	523 ha (34.874 unit)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2011)



No	Lokasi	Jenis Budidaya	Daya Dukung	Sumber Pustaka
11	Bakauheni - Ketapang	Rumput Laut	302.36 ha	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2011)
12	Bakauheni - Ketapang	Keramba Jaring Apung	165,19 ha	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2011)
13	Labuan Maringgai	Rumput Laut	651,7 ha (1,629 unit)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2011)
14	Labuan Maringgai	Budidaya Kerang- Kerangan	148,4 ha (371 unit dengan 1 unit terdiri 20 plot dengan ukuran (5 x 2,5 m)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2011)
15	Labuan Maringgai	Keramba Jaring Apung	297,5 ha (19.816 unit)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2011)

C. Daya Dukung Wisata Bahari

Daya dukung kawasan wisata bahari merupakan satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan objek wisata. Daya dukung kawasan ini perlu dikembangkan untuk mengurangi dampak-dampak dari degradasi lingkungan, sehingga kawasan tersebut dapat terjaga kelestariannya. Namun dalam pembangunan berkelanjutan terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil tidak melarang aktivitas pembangunan ekonomi, tetapi menganjurkannya dengan persyaratan bahwa laju (tingkat) kegiatan pembangunan tidak melampaui daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan lahan. Tabel dibawah ini adalah daya dukung wisata diving, snorkeling, dan wisata.

Tabel 4.13 Daya Dukung Wisata Bahari

No	Lokasi	Jenis Wisata	Daya Dukung	Sumber Pustaka
1	Pulau Umang Umang, Perairan Bangunan, Sianas, Sagenom (Pulau Sibesi)	Wisata Diving	72,42 Ha (2.394 orang/ hari)	Johan (2016)
2	Pulau Umang Umang, Perairan Bangunan, Regahan Lada (Pulau Sibesi)	Wisana Snorkling	68, 79 Ha (2.489 orang/ hari)	Johan (2016)



No	Lokasi	Jenis Wisata	Daya Dukung	Sumber Pustaka
3	Pantai Pasir Putih Desa Bali Jati Agung (Teluk Kiluan)	Wisata Pantai	9.300 m ² (2.325 orang/hari)	Hudisaputra et al (2012)
4	Pekon Kiluan Negeri Bagian Timur Desa Sinar Maju (Teluk Kiluan)	Wisata Pantai	1500 m ² (375)	Hudisaputra et al (2012)
5	Pulau Kelapa (Teluk Kiluan)	Wisata Pantai	9.000 m ² (900 orang/ hari)	Hudisaputra et al (2012)

Tabel 4.14 Arah Kajian Dampak/Resiko terhadap Jasa Lingkungan

		Daya		Arah Kajian	Dampak/Resiko t	erhadap Jasa Ekosiste	m	
No.	Zona	Dukung dan Daya Tampung	Jasa Perubahan Iklim	Jasa Biodiversitas	Jasa Pangan	Jasa Penguraian Limbah	Jasa Penyediaan Air bersih	Jasa Budaya Tempat Tinggal
1	Zona Pariwisata	Mengkaji pariwisata yang bersifat massal terhadap daya dukung dan daya tampung	Mengkaji lokasi dan luasan zona pariwisata terhadap perubahan iklim	Mengkaji pengaruh lokasi zona pariwisata terhadap biodiversitas biota laut dari sarana prasarana parawisata	Menghindari penggunaan lahan produktif untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Mengkaji kontibusi pengembangan zona pariwisata terhadap pencemaran air laut (sampah maupun limbah cair)	Mengkaji dampak bukaan lahan untuk mendukung zona pariwisata terhadap ketersediaan air	Mengkaji Sosekbud masyarakat lokal terhadap pengelolaan pariwisata
2.	Zona Pemukiman	Mengkaji pengaruh pengemban gan zona pemukiman terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan pesisir	Mengkaj pengaruh pengembangan zona pemukiman terhadap perubahan iklim	Mengkaji pengaruh pengembangan zona pemukiman terhadap biodiversitas biota laut dari sarana prasarana parawisata	Menghindari penggunaan lahan produktif untuk pembangunan sarana dan prasarana pemukiman	Mengkaji kontibusi pengembangan zona pemukiman terhadap pencemaran air laut (sampah maupun limbah cair)	Mengkaji dampak bukaan lahan untuk mendukung zona pemukiman terhadap ketersediaan air	Mengkaji Sosekbud masyarakat lokal terhadap pengembangan zona pemukiman
3.	Zona Pelabuhan	Mengkaji pengaruh pengemban gan zona pelabuhan terhadap	Tidak dikaji karena tidak berdampak	Mengkaji pengaruh lokasi zona pelabuhan terhadap biodiversitas biota lau	Menghindari penggunaan lahan produktif untuk pembangunan sarana dan	Mengkaji kontibusi pengembangan zona pelabuhan terhadap pencemaran air laut	Mengkaji dampak bukaan lahan untuk mendukung zona pelabuhan terhadap ketersediaan air	Mengkaji Sosekbud masyarakat lokal terhadap pengembangan Pelabuhan

		Daya		Arah Kajian	Dampak/Resiko t	erhadap Jasa Ekosiste	m	
No.	Zona	Dukung dan Daya Tampung	Jasa Perubahan Iklim	Jasa Biodiversitas	Jasa Pangan	Jasa Penguraian Limbah	Jasa Penyediaan Air bersih	Jasa Budaya Tempat Tinggal
		daya dukung dan daya tampung lingkungan pesisir			prasarana pelauhan			(multiple efek pelabuhan)
4	Pertambangan	Mengkaji pengaruh eksplorasi dan eksploitasi pertambang an terhadap ekosistem pesisir	Mengkaj pengaruh eksplorasi dan eksploitasi pertambangan terhadap perubahan iklim	Mengkaj pengaruh eksplorasi dan eksploitasi pertambangan terhadap biodiversitas ekosistem laut	Tidak dikaji karena tidak berdampak	Mengkaji kontibusi pengaruh eksplorasi dan eksploitasi pertambangan terhadap pencemaran air laut	Tidak dikaji karena tidak berdampak	Tidak dikaji karena tidak berdampak
5.	Zona Perikanan Tangkap	Mengkaji pengaruh pengemban gan zona tangkap terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan pesisir	Tidak dikaji karena tidak berdampak	Tidak dikaji karena biodiversitas hanya utk darat dan wilayah pesisir	Tidak dikaji karena tidak berdampak	Mengkaji kontibusi pengembangan zona perikanan tangkap terhadap pencemaran air laut	Tidak dikaji karena tidak berdampak	Mengkaji kemampuan SDM terhadap pengelolaan perikanan tangkap
6.	Zona Perikanan Budi Daya	Mengkaji pengaruh pengemban	Tidak dikaji karena tidak berdampak	Tidak dikaji karena biodiversitas hanya utk darat dan wilayah pesisir	Menghindari penggunaan lahan produktif	Mengkaji kontibusi pengembangan zona budi daya perikanan	Tidak dikaji karena tidak berdampak	Mengkaji kemampuan SDM terhadap

		Daya		Arah Kajiai	n Dampak/Resiko t	erhadap Jasa Ekosiste	m	
No.	Zona	Dukung dan Daya Tampung	Jasa Perubahan Iklim	Jasa Biodiversitas	Jasa Pangan	Jasa Penguraian Limbah	Jasa Penyediaan Air bersih	Jasa Budaya Tempat Tinggal
		gan zona budidaya perikanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan pesisir			untuk pembangunan sarana dan prasarana budi daya perikanan	terhadap pencemaran air laut Mengkaji pengaruh/kontribus i pencemaran dari daerah hulu (sungai dan dranase) terhadap kualitas air laut yang dibutuhkan untuk budi daya		pengelolaan budi daya perikanan
7.	Zona Industri	Mengkaji pengaruh pengemban gan zona industri terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan pesisir	Mengkaj lokasi dan luasan zona industri terhadap perubahan iklim	Mengkaji pengaruh lokasi zona Industri terhadap biodiversitas biota laut	Menghindari penggunaan lahan produktif untuk pembangunan sarana dan prasarana Industri	Mengkaji kontibusi pengembangan zona Industri terhadap pencemaran air laut	Mengkaji dampak bukaan lahan untuk mendukung zona Industri terhadap ketersediaan air	Mengkaji Sosekbud masyarakat lokal terhadap pengembangan industri



4.3.3 Kajian Berdasarkan Hasil Overlay Peta Jasa Ekosistem

Hasil overlay peta jasa ekosistem dengan program yang berpengaruh pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

1. Jasa Perubahan Iklim

Berdasarkan hasil overlay peta jasa perubahan iklim pada Lampiran 01 pada Peta 17 terhadap tujuh (7) program pada rencana zonasi pemanfaatan ruang dalam RZWP-3-K Provinsi Lampung, maka pada lokasi yang berpengaruh terhadap perubahan iklim tinggi perlu perlakuan khusus agar tidak terlalu luas sehingga mempengaruhi kemampuan lingkungan terhadap jasa perubahan iklim. Lokasi yang perlu dicermati pada daerah wisata pantai adalah di Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan) dan Kecamatan Pesisir Selatan, dan Pesisir Tengah (Kabupaten Pesisir Barat).

Tabel 4.15 Kajian Jasa Perubahan Iklim dan Alokasi Ruang RZWP-3-K

NI-	Wala / Wata				Zona				IV.
No	Kab/ Kota	Pariwisata	Pemukiman	Pelabuhan	Pertambangan	P. Tangkap	P. Budidaya	Industri	Ket.
1	Tulang Bawang	1	-	-	-	-	-	-	
2	Lampung Timur	-	-	-	Sedang	-	-	-	
3	Lampung Selatan	Rendah- Tinggi (Kalianda)	-	-	-	-	-	-	Pariwisata di Kalianda perlu mendapat perhatian khusus
4	Bandar Lampung	Sedang	Sedang	-	-	-	-	-	
5	Pesawaran	Sedang	-	-	-	-	-	-	
6	Tanggamus	-	-	-	-	-	-		
7	Pesisir Barat	Sedang- Tinggi (Kec. Pesisir Selatan, dan Pesisir Tengah)	-	-	-	-	-	Sedang	Pariwisata pantai di Kec., Pesisir Selatan, dan Pesisir Tengah perlu mendapat perhatian



2. Biodiversitas

Dari overlay peta pada Lampiran 1 pada Peta 18 yang perlu dicermati adalah agar program dan zona pemanfaatan untuk pariwisata, pelabuhan dan industri menghindari lokasi yang mempunyai biodiversitas tinggi. Lokasi pariwisata Bentang laut di Kecamatan Rajabasa terletak pada Biodiversitas tinggi. Zonasi pemanfaatan pada Biodiversitas tinggi perlu adanya perlakuan khusus sehingga tidak menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati wilayah pesisir.

 Tabel 4.16
 Kajian Jasa Biodiversitas dan Alokasi Ruang RZWP-3-K

NI.	Wala / Wata				Zona				Watanana
No	Kab/ Kota	Pariwisata	Pemukiman	Pelabuhan	Pertambangan	P. Tangkap	P. Budidaya	Industri	Keterangan
1	Tulang Bawang	-	-	Sedang	-	-	-	-	
2	Lampung Timur	-	-	Sedang	Sedang	-	-	-	
3	Lampung Selatan	Rendah- Tinggi (Kecamatan Rajabasa)	-	Sedang	-			-	Lokasi pariwisata Bentang laut di Kecamatan Rajabasa terletak pada Biodiversitas tinggi perlu mendapat perhatian khusus
4	Bandar Lampung	Rendah	Rendah	Rendah	-	-	-	-	
5	Pesawaran	Rendah	-	Rendah	-	-	-	-	
6	Tanggamus	-	-	Rendah- Sedang	-	-	-	Sedang	
7	Pesisir Barat	Sedang	-	Rendah- Sedang	-	-	-	-	



3. Jasa Pangan

Untuk rencana lokasi RZWP-3-K yang berada pada jasa pangan yang tinggi pada Lampiran 01 pada Peta 19 maka perlu perlakuan agar pembangunan sarana dan prasarana pendudukung setiap program yang berada pada wilayah pesisirtidak menimbulkan konflik penggunaan lahan sehingga lahan produktif untuk pangan dapat dipertahankan. Sedang pembangunan sarana dan prasarana yang berada lahan dengan jasa pangan yang rendah, sudah sesuai tetapi perlu adanya supplay pangan dari daerah lain.

 Tabel 4.17
 Kajian Jasa Pangan dan Alokasi Ruang RZWP-3-K

N/ -	Wala / Wata				Zona				W.A.
No	Kab/ Kota	Pariwisata	Pemukiman	Pelabuhan	Pertambangan	P. Tangkap	P. Budidaya	Industri	Ket.
1	Tulang Bawang	-	-	Rendah	-	-	-	-	
2	Lampung Timur	-	-	Rendah	-	-	Rendah	-	
3	Lampung Selatan	Rendah – Tinggi (Ketapang, Bakauheni, Kalianda, Sidomulyo)	-	Rendah- Tinggi (Ketapang, Bakauheni, Kalianda, Sidomulyo)	-	-	Rendah- Tinggi (Ketapang, Bakauheni, Kalianda)	-	Daerah Ketapang, Bakauheni, Kalianda perlu mendapat perhatian khusus, karena pesisirnya merupakan dengan jasa pangan tinggi
4	Bandar Lampung	Rendah	Rendah	Rendah	-	-	Rendah	-	
5	Pesawaran	Rendah	-	Rendah- Sedang	-	-	Rendah	-	
6	Tanggamus	-	-	Rendah- Tinggi (Kota Agung)	-	-	Rendah- Sedang	Rendah	
7	Pesisir Barat	Sedang	-	Sedang- Tinggi (Bengkunat Belimbing)	-	-	-	-	



4. Jasa Penguraian Limbah

Jasa penguraian limbah sangat bermanfaat untuk menganalisa kesesuaian pengembangan budi daya perikanan, dan perikanan tangkap agar tidak menganggu tingkat produktifitas ke depannya. Disamping itu penempatan zonasi pelabuhan, pariwisata dan industri dalam kaitannya dengan kontribusi pencemaran kawasan ini agar tidak semakin menurunkan daya penguraian limbah. Berdasarkan Lampiran 01 pada Peta 20 maka dapat disimpulkan beberapa lokasi memiliki jasa penguraian limbah rendah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.18 Kajian Jasa Pengurai Limbah dan Alokasi Ruang RZWP-3-K

No	Kab/ Kota				Zona				Ket.
NO	Kau/ Kuta	Pariwisata	Pemukiman	Pelabuhan	Pertambangan	P. Tangkap	P. Budidaya	Industri	Ket.
1	Tulang Bawang	-	-	Tinggi		-	-	-	
2	Lampung Timur	-	-	Tinggi	Sedang-Tinggi	-	Tinggi	-	
3	Lampung Selatan	Rendah (Rajabasa, Ketibung)- Tinggi	-	Rendah (Rajabasa dan Ketibung)- Tinggi		-	Rendah (Rajabasa dan Ketibung)- Tinggi	-	Daerah Rajabasa dan Ketibung perlu mendapat perhatian khusus, karena jasa pengurai limbah rendah
4	Bandar Lampung	Rendah (Seluruh Pesisir)	Rendah (Seluruh Pesisir)	Rendah (Seluruh Pesisir)		-	Rendah (Seluruh Pesisir)	-	Seluruh Pesisir Bandar Lampung perlu mendapat perhatian khusus, karena jasa pengurai

								limbah rendah
5	Pesawaran	Rendah (Seluruh Pesisir)	-	Rendah (Seluruh Pesisir)	-	Rendah (Seluruh Pesisir)	-	Seluruh Pesisir Pesawaran perlu mendapat perhatian khusus, karena jasa pengurai limbah rendah
6	Tanggamus	-	-	Rendah (Limau, Semaka, Pematang Sawa, Cukuh Balak, Klumbayan,)– Tinggi	-	Rendah (Limau, Semaka, Pematang Sawa, Cukuh Balak, Klumbayan)– Tinggi	Rendah (Limau dan Cukuh Balak)	Daerah Limau, Semaka, Pematang Sawa dan Cukuh Balak perlu mendapat perhatian khusus, karena jasa pengurai limbah rendah
7	Pesisir Barat	Sedang	-	Sedang	-	-		



5. Jasa Ketersedian Air Bersih

Berdasarkan hasil overlay peta jasa tersedia air bersih pada Lampiran 01 pada Peta 21 terhadap tujuh (7) program dan zonasi pemanfaatan ruang dalam RZWP-3-K didapat hasil bahwa beberapa daerah ketersedia air bersihnya rendah sehingga tidak sesuai atau perlu perlakuan khusus apabila akan dikembangkan untuk zona pelabuhan, pariwisata, dan industri. Tabel dibawah hasil dari overlay petanya.

Tabel 4.19 Kajian Jasa Ketersediaan Air Bersih dan Alokasi Ruang RZWP-3-K

No	Kab/ Kota		Ket.						
		Pariwisata	Pemukiman	Pelabuhan	Pertambangan	P. Tangkap	P. Budidaya	Industri	
1	Tulang Bawang	-	-	Rendah (Dente Teladas)	-	-	-	-	Kecamatan Dente Teladas Ketersediaan air bersihnya rendah
2	Lampung Timur	-	-	Rendah (Labuan Maringgai)	-	-	1	-	Kecamatan Labuan Maringgai Ketersediaan air bersihnya rendah
3	Lampung Selatan	Redah (Ketapang, bakauheni, Rajabasa) - Sedang	-	Rendah (Ketapang, bakauheni, Rajabasa) - Sedang	-	-	•	-	Kecamatan Ketapang, Bakauheni, dan Rajabasa Ketersediaan air bersihnya rendah
4	Bandar Lampung	Rendah	Rendah (Seluruh Pesisir)	Rendah (Seluruh Pesisir)	-	-	-	-	Seluruh Pesisir Bandar Lampung perlu mendapat perhatian khusus karena ketersediaan air bersih rendah
5	Pesawaran	Rendah (Seluruh Pesisir)	-	Rendah (Seluruh Pesisir)	-	-	-	-	Seluruh Pesisir Bandar Lampung perlu mendapat perhatian khusus karena ketersediaan air bersih rendah
6	Tanggamus	-	-	Rendah - Tinggi	-	-	-	Sedang- Tinggi	
7	Pesisir Barat	Sedang	-	Sedang	-	-	-	-	



6. Jasa Budaya, Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Jasa tempat tinggal dianalisis dalam kaitannya dengan kemampuan lahan maupun sosial masyarakat lokal untuk mengembangkan kesejahteraannya. Yang perlu dicermati adalah tujuh (7) program dan zonasi RZWP-3-K yang berada pada jasa lingkungan rendah. Dari seluruh daerah kategori rendah memerlukan perhatian khusus terhadap jasa Budaya, tempat Tinggal dan Ruang Hidupnya untuk seluruh zona, dapat dilihat pada Lampiran 01 pada Peta 22.

Tabel 4.20 Kajian Jasa Budaya, Tempat Tinggal dan Ruang Hidup dan Alokasi Ruang RZWP-3-K

No	Kab/ Kota	Zona								
		Pariwisata	Pemukiman	Pelabuhan	Pertambangan	P. Tangkap	P. Budidaya	Industri	Ket.	
1	Tulang Bawang	-	-	Rendah (Seluruh Pesisir)		Rendah (Dente Teladas)	-	-	Kecamatan Dente Teladas mempunyaja sa rendah	
2	Lampung Timur	-	-	Rendah (Seluruh Pesisir)		Rendah (Labuan Maringgai, Pasir Sakti)	-	-	Kecamatan Labuan Maringgai dan Pasir Sakti mempunyaja sa rendah	
3	Lampung Selatan	Rendah (Rajabasa dan Ketibung)- Tinggi	-	Rendah (Rajabasa dan Ketibung)- Tinggi		Rendah (Raja Basa, Ketibung)- Tinggi	Rendah (Raja Basa, Ketibung)- Tinggi	-	Kecamatan Rajabasa dan Ketibung mempunyaja sa rendah	
4	Bandar Lampung	Rendah (Teluk betung Barat)- Tinggi	Sedang- Tinggi	Sedang-Tinggi		Sedang-Tinggi	Sedang- Tinggi	-	Kecamatan Teluk Betung Barat mempunyaja sa rendah	

NI -	77 -1. / 77 - 1 -				Zona				17.1
No	Kab/ Kota	Pariwisata	Pemukiman	Pelabuhan	Pertambangan	P. Tangkap	P. Budidaya	Industri	Ket.
5	Pesawaran	Rendah (Seluruh Pesisir)	-	Rendah (Seluruh Pesisir)		Rendah (Seluruh Pesisir)	Rendah (Seluruh Pesisir)	-	Wilayah Pesisir Kabupaten Pesawaran mempunyaja sa rendah
6	Tanggamus	-	-	Rendah (Limau, Kota Agung Timur)-Tinggi		Rendah (Limau, Pematang Sawa) -Sedang	Rendah (Kecamatan Pematang Sawa, Cukuh Balak, Kelumbayan) -Sedang	Rendah (Limau)- Tinggi	Kecamatan dengan jasa yang rendah perlu mendapat perhatian khusus
7	Pesisir Barat	Sedang	-	Sedang-Tinggi		Sedang-Tinggi	-	-	



4.4 PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN

Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan/program Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lampung sesuai dengan amanat Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tercantum dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 4.21 Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan

			Pengaruh	Rumı	ısan
No.	Program yg Berpengaruh	Zona	Program (Langsung atau Tidak Langsung)	Mitigasi	Altermatif
1	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata bahari	Zona Pariwisata Kecamatan Rajabasa berada pada biodivertas yang tinggi Kecamatan Ketapang, Bakauheni, Kalianda, dan Sidomulyo berada pada jasa pangan yang tinggi	Saranan dan prasarana berada pada daerah Jasa Biodiversitas yang tinggi sehingga akan menimbulkan penurunan biodiversitas Berada pada lahan dengan jasa pangan tinggi sehingga menimbulkan konflik pemanfaatan lahan produktif	Pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Selektif dalam pemberian izin
2	Pembangunan dan pengembangan pemukiman nelayan di Kota Bandar Lampung	Zona Pemukiman Kecamatan Telukbetung Timur, Telukbetung Selatan, Bumi Waras berada pada jasa Ketersediaan Air Bersih yang rendah Kecamatan Telukbetung Timur, Telukbetung Selatan, Bumi	Pemukiman nelayan sangat membutuhkan air bersih, kekurangan air bersih harus didatangkan dari daerah lain Lokasi mempunyai jasa pengurai limbah yang rendah dan sangat rentan akan pencemaran laut	Pengendalian pencemaran laut	Selektif dalam pemberian izin



	Pengaruh		Pengaruh	Rumusan	
No.	Program yg Berpengaruh	Zona	Program (Langsung atau Tidak Langsung)	Mitigasi	Altermatif
		Waras berada pada jasa Pengurai Limbah yang rendah			
3	Pembangunan Pelabuhan laut dan Perikanan	Zona Pelabuhan Bengkunat Belimbing pada Jasa Biodiversitas Tinggi Bengkunat Belimbing pada Jasa Pangan Tinggi	Pelabuhan pada lokasi yang memiliki biodiversitas tinggi, akan berdampak pada penurunan biodiversitas Pembangunan akan berdampak pada pemanfaatan lahan produktif (jasa pangan)	Pemilihan lokasi yang sesuai	Melengkapi pembangunan pelabuhan dengan kajian lingkungan (pelabuhan berwawasan lingkungan)
4	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan perikanan	Zona Pelabuhan Pelabuhan Yang Eksisting	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan pada lokasi yang daya penguraian limbah rendah akan berkontribusi peningkatan pencemaran Berada pada lokasi yang ketersedia air bersihnya rendah sehingga pembangunan pelabuhan akan meningkatkan kebutuhan air	Pengendalian pencemaran dari air ballast dan tumpahan minyak serta sampahSuplay air bersih Untuk aktifitas pelabuhan	Peningkatan pengawasan pengendalian pencemaran Koordinasi dengan RDTR wilayah darat
5	Pengembangan Eksplorasi dan Eksploitasi kawasan pertambahan yang	Zona pertambangan pada di Kecamatan Labuan Maringgai	Eksplorasi dan Eksploitasi pertambangan akan berpengaruh terhadap kelestarian ekosistem laut	Pengendalian pengaruh Eksplorasi dan Eksploitasi pertambangan terhadap pencemaran laut	Perijinan Amdal diperketat



			Pengaruh	Rumı	ısan
No.	Program yg Berpengaruh	Zona	Program (Langsung atau Tidak Langsung)	Mitigasi	Altermatif
	berwawasan lingkungan				
6	Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap	Zona Perikanan Tangkap Seluruh perairan Kabupaten dan Kota	Berada pada lokasi yang kemampuan SDM masyarakat lokal rendah, pengembangan perikanan tangkap memerlukan penyiapan SDM	Perlu peningkatan SDM nelayan	Perlu pendidikan dan latihan masyarakat
7	Pengembangan budi daya laut yang berbasis masyarakat	Zona Budi Daya PerikananDaer ah Rajabasa, ketibung, Limau, Semaka, Pematang Sawa, Cukuh Balak, Klumbayan, Padang Cermin, Marga Punduh, Punduh Pidada	Berada pada lokasi yang memiliki penyerapan limbah rendah sehingga pencemaran di daerah hulu akan berdampak pada budi daya perikanan Berada pada lokasi yang kemampuan SDM masyarakat lokal rendah, pengembangan budidaya perikanan memerlukan penyiapan SDM	Menjaga agar kegiatan wilayah pesisir dan hulu dari kegiatan yang akan yang mencemari Perlu peningkatan SDM nelayan	Selektif dalam pemberian izin dan pemanfaatan lahan pesisir Integrasi kegiatan antara budi daya ikan dengan kegiatan pariwisata (Minawisata) Perlu pendidikan dan latihan masyarakat
8	Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Industri Maritim (KIM) di Tanggamus	Zona Industri Kecamatan Limau dan Cukuh Balak Jasa Pengurai Limbah rendah	Adanya kegiatan industri maritim diwilayah pesisir menyebabkan konflik dengan daerah tangkapan perikanankarena hasil buangan atau limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri	Pengendalian pemanfaatan lahan untuk sarana dan prasarana	Selektif dalam pemberian izinPengemban gan industri maritim ramah lingkungan dan berbasis ekonomi masyarakat pesisir



4.5 REKOMENDASI

Rekomendasi KLHS terhadap KRP Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 pada Pasal 16 tercantum dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 4.22 Rekomendasi Terhadap KRP

No.	Program yang Berpengaruh	Rekomendasi	Analisis Manfaat
1	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata bahari	Pembangunan sarana dan prasarana wisata yang ramah lingkungan.	Peningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan akan kunjungan wisata dan meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir
2	Pembangunan dan pengembangan pemukiman nelayan di Kota Bandar Lampung	Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman nelayan yang ramah bencana	Penataan pemukiman nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir
3	Pembangunan Pelabuhan laut dan Perikanan	Pembangunan Pelabuhan yang mendukung transportasi laut dan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Peningkatan fasilitas pelabuhan meningkatkan aktivitas pelabuhan dan produksi perikanan
4	Peningkatan pembangunansarana dan prasarana pelabuhan laut dan perikanan	Pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan yang ramah lingkungan.	Peningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan akan meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir
5	Pengembangan Eksplorasi dan Eksploitasi kawasan pertambahan yang berwawasan lingkungan	Eksplorasi dan eksploitasi pertambangan yang ramah lingkungan	Eksploitasi pertambangan yang ramah lingkungan sangat berguna untuk penyediaan energi
6	Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk pengelolaan perikanan tangkap Lampung yang lestari dan berkelanjutan	Peningkatan sarana dan prasarana ini akan meningkatkan pendapatan nelayan, pengolah ikan dan masyarakat pesisir
7	Pengembangan budidaya laut yang berbasis masyarakat	Mengintegrasikan kegiatan antara budidaya ikan	Kegiatan budidaya ikan berjalan dengan baik dan kegiatan pariwisata tidak



No.	Program yang Berpengaruh	Rekomendasi	Analisis Manfaat
		dengan kegiatan pariwisata (Minawisata)	terhalang, sehingga penghasilan masyarakat dapat meningkat dan lingkungan terjaga/lestari
8	Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Industri Maritim (KIM) di Tanggamus	Pengembangan industri maritim diarah industri yang ramah lingkungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir	Pengembangan industri maritim untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir

4.6 INTEGRASI PROGRAM DENGAN RANPERDA

Dalam Integrasi Program dengan Ranperda yang dilakukan adalah melihat kebijakan yang ada pada Ranperda RZWP-3-K apakah sudah sesuai dengan rekomendasi yang didapatkan darihasil Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan. Adapun hasil penintegrasian antara rekomendasi dengan Ranperda RZWP-3-K disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.23 Hasil Pengintegrasian antara Rekomendasi dengan Ranperda RZWP-3-K Provinsi Lampung

No	Program yg Rekomendasi		Integrasi deng	an KRP Perda	
No.	Berpengaruh	кекошепцаѕі	Semula	Perbaikan	
1	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata bahari	Pembangunan sarana dan prasarana wisata yang ramah lingkungan.	Pasal 12 ayat (6) Arahan pengembangan zona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. peningkatan daya tarik dan destinasi wisata bahari; b. pengembangan edukasi dan partisipasi untuk wisatawan dan masyarakat setempat; c. pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata bahari meliputi akomodasi, rumah makan, transportasi, dan	Sudah terakomodir dalam Perda RZWP3K pada Paragraf 1 Pasal 12 ayat (6) pada huruf c yang berbunyi: c. sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata bahari meliputi akomodasi, rumah makan, transportasi, dan beberapa fasilitas umum lainnya yang tidak melebihi daya dukung lingkungan;	



	Program yg		Integrasi deng	an KRP Perda
No.	Berpengaruh	Rekomendasi	Semula	Perbaikan
	Do. Pongui un		beberapa fasilitas umum lainnya yang tidak melebihi daya dukung lingkungan; d. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaannya di bidang pariwisata; e. integrasi kegiatan wisata bahari dengan pemanfaatan ruang lainnya yang memiliki potensi strategis meliputi perikanan budidaya, perikanan tangkap, konservasi dan alur laut; dan f. pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	reibaikan
2	Pembangunan dan pengembangan pemukiman nelayan di Kota Bandar Lampung	Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman nelayan yang ramah bencana	Pasal 13 ayat (4) Arahan pengembangan zona permukiman sub zona permukiman nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. pengembangan perbaikan lingkungan permukiman nelayan; b. pengembangan dan/atau pengendalian permukiman nelayan; dan c. peningkatan peranserta masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi di permukiman dan antar permukiman.	Perlu ditambahkan pada Pasal 13 ayat (4) huruf d yang berbunyi: d. pembangunan dan pengembangan pemukiman nelayan yang ramah bencana
3	Pembangunan Pelabuhan laut dan Perikanan	Pembangunan Pelabuhan yang mendukung transportasi laut dan penangkapan ikan yang ramah	Pasal 14 ayat (7) Arahan pengembangan zona pelabuhan pada sub zona DLKr dan DLKp sebagaimana dimaksud pada	Sudah terakomodir dalam Perda RZWP3K pada Paragraf 3 Pasal 14 ayat (6) pada huruf d yang berbunyi: d. pencegahan dampak terhadap lingkungan



No.	Program yg Berpengaruh	Rekomendasi lingkungan dan berkelanjutan	Semula ayat (1) huruf a, diarahkan untuk: a. penguatan kepastian	Perbaikan berupa penyediaan fasilitas pembuangan
			untuk:	
			hukum terhadap DLKr dan DLKp yang sudah ditetapkan oleh Kementerian dan/atau SKPD yang berwenang di bidang kepelabuhanan; b. pengembangan rute pelayaran yang mendukung konektivitas intra koridor ekonomi dalam rangka mendukung terintegrasinya penataan ruang WP-3-K; c. peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan untuk pengembangan WP-3-K; d. pencegahan dampak terhadap lingkungan berupa penyediaan fasilitas pembuangan limbah, limbah berminyak dan bahan kimia untuk menghindari pencemaran perairan WP-3-K; e. pengembangan transportasi laut dengan mengembangkan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus dan meningkatkan kondisi dan optimalisasi pelabuhan yang ada; dan f. pendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan pelabuhan internasional.	limbah, limbah berminyak dan bahan kimia untuk menghindari pencemaran perairan WP-3-K;



	No Program yg Pokomon doci		Integrasi dengan KRP Perda			
No.	Berpengaruh	Rekomendasi	Semula	Perbaikan		
			dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan untuk: a. penetapan WKOPP pada masing-masing wilayah pelabuhan perikanan; b. penguatan penetapan landasan hukum pelabuhan perikanan; c. peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan; dan pengembangan dan peningkatan fasilitas pada pelabuhan perikanan yang berfungsi sebagai simpul-simpul pergerakan barang dan manusia	 a. penetapan WKOPP pada masing-masing wilayah pelabuhan perikanan; b. penguatan penetapan landasan hukum pelabuhan perikanan; c. peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan; dan d. pencegahan dampak terhadap lingkungan berupa penyediaan fasilitas pembuangan limbah, limbah berminyak dan bahan kimia untuk menghindari pencemaran perairan WP-3-K; e. pengembangan dan peningkatan fasilitas pada pelabuhan perikanan yang berfungsi sebagai simpul-simpul pergerakan barang dan manusia 		
4	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan perikanan	Pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan yang ramah lingkungan.	Pasal 14 Ayat (7) huruf d yang berbunyi: Arahan pengembangan zona pelabuhan pada sub zona DLKr dan DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk: .d. pencegahan dampak terhadap lingkungan berupa penyediaan fasilitas pembuangan limbah, limbah berminyak dan bahan kimia untuk menghindari pencemaran perairan WP3K.	Sudah terakomodir dalam Perda RZWP3K pada Paragraf 3 Pasal 14 ayat (6) pada huruf d yang berbunyi: e. pencegahan dampak terhadap lingkungan berupa penyediaan fasilitas pembuangan limbah, limbah berminyak dan bahan kimia untuk menghindari pencemaran perairan WP-3-K;		



N.T.	No Program yg Pokomondosi		Integrasi dengan KRP Perda			
No.	Berpengaruh	Rekomendasi	Semula	Perbaikan		
			Pasal 14 ayat (8) Arahan pengembangan zona pelabuhan pada sub zona WKOPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan untuk: a. penetapan WKOPP pada masing-masing wilayah pelabuhan perikanan; b. penguatan penetapan landasan hukum pelabuhan perikanan; c. peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan; dan d. pengembangan dan peningkatan fasilitas pada pelabuhan perikanan yang berfungsi sebagai simpul-simpul pergerakan barang dan manusia	Perlu ditambahkan pada Pasal 14 ayat (8) huruf d sehingga secara lengkap berbunyi: a. penetapan WKOPP pada masing-masing wilayah pelabuhan perikanan; b. penguatan penetapan landasan hukum pelabuhan perikanan; c. peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan; dan d. pencegahan dampak terhadap lingkungan berupa penyediaan fasilitas pembuangan limbah, limbah berminyak dan bahan kimia untuk menghindari pencemaran perairan WP-3-K; e. pengembangan dan peningkatan fasilitas pada pelabuhan perikanan yang berfungsi sebagai simpul-simpul pergerakan barang dan manusia		
5	Pengembangan Eksplorasi dan Eksploitasi kawasan pertambahan yang berwawasan lingkungan	Eksplorasi dan Eksploitasi kawasan pertambahan yang memperhatikan kelestarian ekosistem laut	Pasal 15 ayat (3) Arahan pengembangan rencana zona pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. pengembangan zona pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan fisik, lingkungan hayati,	Sudah terakomodir dalam Perda RZWP-3-K pada Pasal 15 ayat (3) pada huruf a yang berbunyi: a.pengembangan zona pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan fisik, lingkungan hayati,		



	Program yg		Integrasi dengan KRP Perda			
No.	Berpengaruh	Rekomendasi	Semula	Perbaikan		
			dan lingkungan sosial ekonomi budaya;	dan lingkungan sosial ekonomi budaya;		
6	Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk pengelolaan perikanan tangkap yang lestari dan berkelanjutan		0 0		



No.	Program yg	Rekomendasi	Integrasi dengan KRP Perda		
NO.	Berpengaruh	Rekomendasi	Semula	Perbaikan	
			hasil perikanan tangkap; dan	tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan;	
			j. pengembangan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.	j. peningkatan peran wanita nelayan dalam penanganan/pengolahan hasil perikanan tangkap; dan	
				k. pengembangan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.	
7	Pengembangan budidaya laut yang berbasis masyarakat	Mengintegrasikan kegiatan antara budidaya ikan dengan kegiatan pariwisata (Minawisata)	Pasal 17 ayat (3) Arahan pengembangan sub zona budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. pengembangan budi daya laut meliputi komoditas ikan kerapu, kakap, cobia, bawal, rumput laut, kekerangan, tiram mutiara dan budi daya ikan laut lainnya; b. penataan dan pengembangan budi daya laut; c. peningkatansarana dan prasarana budi daya laut; d. peningkatan kualitas	Pasal 17 ayat (3) huruf j sehingga secara lengkap berbunyi: Arahan pengembangan sub zona budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. pengembangan budi daya laut meliputi komoditas ikan kerapu, kakap, cobia, bawal, rumput laut, kekerangan, tiram mutiara dan budi daya ikan laut lainnya; b. penataan dan pengembangan budi daya laut;	
			benih dan induk yang unggul dan bersertifikat; e. pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan;	c. peningkatansarana dan prasarana budi daya laut; d. peningkatan kualitas benih dan induk yang unggul dan bersertifikat;	
			f. penerapan teknologi budi daya laut yang produktif dan ramah lingkungan;	e. pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan; f. penerapan teknologi budi	
			 g. pengendalian dan/atau mencegah kegiatan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan mengganggu kegiatan budi daya laut; h. pengembangan Kawasan Minapolitan di 	daya laut yang produktif dan ramah lingkungan; g. pengendalian dan/atau mencegah kegiatan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan mengganggu kegiatan budi daya laut;	



N -	Program yg	Dalaan andaa:	Integrasi deng	gan KRP Perda		
No.	Berpengaruh	Rekomendasi	Semula	Perbaikan		
			Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran; Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan; Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti di Kabupaten Lampung Timur; dan Kecamatan Rawa Jitu Timur, Dente Teladas di Kabupaten Tulang Bawang; dan i. pengembangan budi daya ikan off shore lepas pantai di Pantai Barat Lampung dan perairan selatan Tanggamus.	h. pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran; Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan; Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti di Kabupaten Lampung Timur; dan Kecamatan Rawa Jitu Timur, Dente Teladas di Kabupaten Tulang Bawang; dan i. pengembangan budi daya ikan off shore lepas pantai di Pantai Barat Lampung dan perairan selatan Tanggamus; dan j. pengembangan budi daya laut intergrasi dengan pariwisata (Minawisata).		
8	Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Industri Maritim (KIM) di Tanggamus	Pengembangan industri maritim diarahkan untuk industri yang ramah lingkungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir	Pasal 18 ayat (3) berbunyi: Arahan pengembangan zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. penguatan pemantapan kawasan industri maritim terpadu di Kabupaten Tanggamus; b. pengembangan zona industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan aspek teknis lainnya khususnya lingkungan; c. berkembangnya fungsi peruntukan lain di dalam zona industri dibatasi secara proporsional berdasarkan kajian teknis dampak baik langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan;	Sudah terakomodir dalam Perda RZWP-3-K pada Paragraf 7 Pasal 18 ayat (3) pada huruf b yang berbunyi: b. pengembangan zona industri dilakukan dengan mempertimbangkan		



No.	Program yg Berpengaruh	Rekomendasi	Integrasi dengan KRP Perda	
NO.			Semula	Perbaikan
			d. industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya pemulihankeseimbangan lingkungan dan biaya aktifitassosial; dan e. setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana akibat keberadaan industri tersebut.	



Contents

4.1	HASIL DAN PEMBAHASAN TAHAP PERSIAPAN1
4.1.1	Hasil dan Pembahasan Tahap Identifikasi Para Pemangku Kepentingan 1
Tabel 4.1	Pemetaan Pemangku Kepentingan2
4.1.2	Hasil dan Pembahasan Tahap Penyusunan Kerangka Acuan Kerja2
4.2	HASIL DAN PEMBAHASAN TAHAP PENGKAJIAN
4.2.1	Hasil dan Pembahasan Tahap Identifikasi dan Perumusam Isu Pembangunan Berkelanjutan
Tabel 4.2	Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan hasil FGD
Tabel 4.3	Isu-Isu Pokok Pembangunan Berkelanjutan
4.2.2	Hasil dan Pembahasan Tahap Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Error! Bookmark not defined
Tabel 4.4	Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis di Wilayah Kajian RZWP3K Provinsi Lampung
4.2.3	Hasil dan Pembahasan Tahap Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas di Wilayah Kajian RZWP3K Provinsi Lampung (Hasil Tapisan No 2 dengan Pasal 9 (2)11
Tabel 4.5	Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas di Wilayah Kajian RZWP3K Provinsi Lampung13
4.2.4	Hasil dan Pembahasan Tahap Identifikasi Materi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program di Wilayah Kajian RZWP3K22
Tabel 4.6	Identifikasi KRP Yang Berdampak22
Tabel 4.7	Hasil Identifikasi KRP Yang Berdampak28
4.2.5	Hasil dan Pembahasan Tahap Analisis Pengaruh Hasil Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas dan Hasil identifikasi Materi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program di Wilayah Kajian RZWP3K Provinsi30
Tabel 4.8	Uji Silang KRP dan Isu Prioritas30
4.2.6	Perkajian Program Yang Berpengaruh, Bentuk Pengaruh Terhadap Rencana Zonasi/Lokasi31
Tabel 4.9	Program yang Berpengaruh, Isu Prioritas Terhadap Rencana Lokasi/ Pemanfaatan Ruang RZWP3K Provinsi Lampung31
4.3	HASIL DAN PEMBAHASAN TAHAP KAJIAN MUATAN KLHS37
Tabel 4.10	Luasan Rencana/Kegiatan Program Pembangunan37
4.3.2	Analisis Daya Dukung Lingkungan Pesisir49



_	r 4.1 Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Perikanan di Wilayah olaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)(Keputusan ri Kelautan dan Perikanan No 47 Tahun 2016)	51
Tabel 4.11	Estimasi Potensi, Jumlah Tangkap Yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan	
Tabel 4.12	Daya Dukung Budi Daya Perikanan	53
Tabel 4.13	Daya Dukung Wisata Bahari	54
Tabel 4.14	Arah Kajian Dampak/Resiko terhadap Jasa Lingkungan	56
4.3.3	Kajian Berdasarkan Hasil Overlay Peta Jasa Ekosistem	59
Tabel 4.15	Kajian Jasa Perubahan Iklim dan Alokasi Ruang RZWP3K	60
Tabel 4.16	Kajian Jasa Biodiversitas dan Alokasi Ruang RZWP3K	62
Tabel 4.17	Kajian Jasa Pangan dan Alokasi Ruang RZWP3K	64
Tabel 4.18	Kajian Jasa Pengurai Limbah dan Alokasi Ruang RZWP3K	66
Tabel 4.19	Kajian Jasa Ketersediaan Air Bersih dan Alokasi Ruang RZWP3K	69
Tabel 4.20	Kajian Jasa Budaya, Tempat Tinggal dan Ruang Hidup dan Alokasi Ruang RZWP3K	71
4.4	PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN	7 3
Tabel 4.21	Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan	7 3
4.5	REKOMENDASI	76
Tabel 4.22	Rekomendasi terhadap KRP	76
4.6	INTEGRASI PROGRAM DENGAN RANPERDA	77
Tabel 4.23	Hasil Pengintegrasian antara Rekomendasi dengan Ranperda RZWF	² 3K
		77